

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN



MODEL MODERASI BERAGAMA KAUM MUDA MUSLIM MILENIAL DALAM PENGUATAN SIKAP TOLERANSI MELALUI INTELLECTUAL HUMILITY

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Nomor: 092/SP2H/PPM/DRPM/2021, Kontrak Pendanaan Program Pengabdian Masyarakat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 2951/L9/KU.03.00/2021 dan Penugasan LPPM Nomor: 196/III.3AU/LPPM/F/2021

Tahun pertama dari rencana dua tahun

Ketua Tim:

Dr. Hadi Pajarianto, M.Pd.

NIDN. 0919127901

Anggota Tim:

Dr. Imam Pribadi, M.Pd.I.

NIDN. 0911048802

Nur Saqinah Galugu, S.Pd.I. M.Si.

NIDN. 0903048602

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
RINGKASAN	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	2
1.3. Tujuan Khusus Penelitian.....	2
1.4. Urgensi Penelitian	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	3
2.2. Generasi Milenial	3
2.3. Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Digital	4
2.4. Temuan Penelitian Terdahulu	4
2.5. Peta Jalan (Road Map) Penelitian	5
2.6. Rancangan Model Pembelajaran MBKM	6
2.7. Pengalaman Melaksanakan Program MBKM.....	6
BAB 3 METODE Riset	7
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian	7
3.2. Rancangan Penelitian dan Indikator Capaian.....	7
3.3. Teknik Analisis Data	7
3.4. Diagram Alir Penelitian	8
3.5. Jadwal dan Rencana Kerja Penelitian	9
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
4.1. Hasil Yang Dicapai	11
4.1.1 Target dan Capaian Penelitian.....	11
4.1.2 Hasil Analisis	11
4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	26
4.1.5 Menentukan Matrik IFAS (Internal Strategic Analysis Summary) dan EFAS (Esternal Strategic Analysis Summary)	26
4.1.6 Menentukan Posisi Kuadran.....	27
4.2. Mekanisme dan Tata Cara Penanganan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Digital Pada Generasi Milenial Luwu Utara	45
4.2.1 Identifikasi Permasalahan.....	45
4.4. Luaran Yang Dicapai.....	49
BAB 5 KONTRIBUSI MITRA	51
BAB 6 PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

RINGKASAN

Pada berbagai belahan dunia, ancaman konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, etnis, ras, afiliasi politik dan agama masih rawan terjadi, mengancam masa depan umat manusia. Indonesia adalah miniatur keberagaman baik pada aspek budaya maupun agama, dengan ciri keberagaman yang moderat. Moderasi beragama menjadi isu penting dan krusial seiring dengan nilai agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dimensi moderasi beragama meliputi; komitmen kebangsaan, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya lokal. Keberhasilan moderasi beragama akan sangat menentukan sikap toleransi kaum muda muslim milenial yang dimediasi oleh intelektual humility. Tema penelitian ini dikembangkan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Palopo Tahun 2019-2023 pada bidang unggulan sosial humaniora dan pendidikan. Selain itu, moderasi beragama juga menjadi isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. **Tujuan jangka panjang** penelitian ini adalah; (i) mengidentifikasi dampak moderasi beragama terhadap sikap toleransi dengan mediasi *intellectual humility*; (ii) mendesain model moderasi beragama yang relevan untuk memperkuat sikap toleransi; (iii) menguji model moderasi beragama untuk memperkuat sikap toleransi. **Tahapan metode penelitian** ini dirancang selama 2 (dua) tahun dengan target tahunan yang jelas dan terukur. Pada tahun pertama digunakan penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan metode dan tahapan penelitian pengembangan. Pada tahun kedua, menggunakan jenis penelitian kuantitatif-deskriptif, menggunakan metode eksperimen (*experimental method*), karena sudah masuk tahapan mendesain dan menguji model. **Tahun pertama (2022)**, mengidentifikasi dan mendesain model moderasi beragama dan toleransi dengan mediasi *intellectual humility*. Pada tahap ini akan diidentifikasi indikator yang terkait dengan moderasi beragama yang meliputi: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya lokal, dan dampaknya terhadap sikap toleransi kaum muda muslim milenial dengan mediasi *intellectual humility*. Siklus pada tahap ini adalah: (i) identifikasi dan pengamatan awal; (ii) pengumpulan data, dan (iii) analisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan desain awal model moderasi beragama dengan tahapan: (iv) desain model; (v) validasi; dan (vi) revisi model. **Tahun kedua (2023)**, menguji model moderasi beragama untuk menguatkan sikap toleransi. Pada tahap ini dilakukan tahapan: (vii) uji coba model; (viii) revisi model; dan (ix) baku model. **Luaran wajib penelitian** ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal HTS Theologiese Studies / Theological Studies, Publisher: AOSIS (Pty) Ltd, ISSN: 02599422, 20728050. Lembaga Pengindeks: Scopus, Clarivate Analytics Web of Science Core Collection, Arts & Humanities Citation Index, AHCI (previously known as ISI), Quartil: Q1. Sedangkan **luaran tambahan** adalah buku dan Hak Cipta pada Kemenkumham (Granted). **Tingkat Kesiapan Teknologi** yang diusulkan dalam riset dasar ini adalah 1-3.

KATA KUNCI: Moderasi Beragama; Toleransi, Intelektual Humility; Kaum Muda; Milenial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada berbagai belahan dunia, ancaman konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, etnis, ras, afiliasi politik, dan sentimen agama masih rawan terjadi, berujung dominasi mayoritas terhadap minoritas (Rogers, 2018; Syarif, 2019; Yazdani, 2020). Kondisi ini juga disebabkan oleh sikap keagamaan yang ekstrim dan merasa benar sendiri. Beberapa negara yang mengalami masalah dalam hubungan antar umat beragama misalnya, perseteruan Muslim dengan Budha terjadi di Sri Lanka dan Myanmar, di India juga terjadi konflik antara kelompok Hindu dan Muslim yang diakibatkan oleh saling hina antar umat beragama (Frydenlund, 2015; Singh, 2018). Situasi ini benar-benar memaksa umat manusia berada pada situasi konflik bahkan perang yang melelahkan. Beberapa riset menemukan peran organisasi berbasis agama dan pemuka agama dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi. Mediasi dapat dilakukan dengan memperbesar titik temu antara nilai agama dengan budaya, proses inilah yang dinamakan dengan moderasi memilih jalan tengah sebagai resolusi konflik dan perdamaian, serta memperkuat relasi agama (Pajarianto, 2022; Pajarianto, Pribadi, Sari, et al., 2022).

Secara demografis, Indonesia memiliki aspek krusial untuk terjadinya konflik antar satu agama dengan dengan penganut agama yang lain, karena memiliki agama yang beragam. Islam sebagai agama mayoritas, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan yang hidup berabad lamanya di nusantara. Belum lagi ratusan suku dengan berbagai bahasa yang berbeda. Belajar dari konflik yang memanfaatkan sentimen agama seperti di Poso, Maluku, Kalimantan, dan daerah lainnya, saat ini toleransi terus didorong oleh pemerintah dan civil society. *Survei dari Politika Research and Consulting (PRC)* bersama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) tahun 2022, terdapat peningkatan nilai situasi toleransi suku bangsa di Indonesia berdasarkan penilaian para tokoh tersebut adalah 7,32 atau masuk kategori baik. Begitu juga dengan situasi toleransi beragama dengan nilai 6,85. Lalu situasi keamanan mendapatkan nilai 6,83 dan situasi peran sipil (6,57), situasi penegakan HAM (6,05), dan situasi perekonomian (6,01) (Purwati et al., 2022).

Indonesia dapat menjadi model dalam mengelola potensi konflik agama dan suku, dengan pemahaman, sikap, dan perilaku keagamaan yang toleran, sehingga moderasi menjadi ciri dan proses yang unik (Zakaria, 2020). Moderasi beragama telah menjadi kebijakan nasional sebagai solusi pencegahan intoleransi dan radikalisme (Subchi et al., 2022). Moderasi sebenarnya adalah inti dari agama Islam yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017). Moderasi beragama setidaknya memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) anti-kekerasan; dan 3) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ketiga indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh kaum milenial di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki (Fahri & Zainuri, 2019). Kaum milenial yang didefinisikan sebagai kelompok yang lahir antara 1980 dan 1995 (Foot & Stoffman, 1996). David Foot adalah ahli demografi yang mendasarkan pendapatnya pada mereka sebagai “Baby Boom Echo,”. Sebagai kelompok, Milenial dikatakan memiliki kesamaan lokasi dalam waktu

sejarah, dibentuk oleh peristiwa dan pengalaman sejarah waktu itu (Gilleard, 2004). Konseptualisasi "generasi" ini berakar pada teori Mannheim atau sosiologi generasi, di mana anggota dari generasi yang sama berbagi lebih dari tahun kelahiran yang sama. Sebagai Akibatnya, lingkungan tempat kaum Milenial tumbuh selama tahun-tahun pembentukan mereka memengaruhi nilai, sikap, dan perilaku mereka (Mannheim, 1984).

Beberapa peneliti telah mengeksplorasi isu moderasi beragama, tetapi pada umumnya masih pada kajian pustaka dan dipublikasikan pada jurnal nasional. *Pertama*, dilakukan oleh Nuraliah Ali untuk mengukur moderasi beragama secara deskriptif dengan indikator yang terbatas. Padahal, untuk menentukan cara pandang seseorang, sikap, dan metode keagamaan dapat dirumuskan lebih banyak indikator (Ali, 2020), atau mempertimbangkan variabel lain sebagai mediasi. *Kedua*, menurut Dodego moderasi beragama dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena sederhana dan tidak kaku, serta mengedepankan keharmonisan (Dodego & Witro, 2020). *Ketiga*, studi di Australia oleh Markus juga menguraikan adanya diskriminasi potensi kaum muda milenial, tetapi mereka memanfaatkan peluang dan keragaman budaya dengan baik untuk memahami perbedaan (Markus, 2017). *Keempat*, Subchi menemukan religiusitas yang memiliki pengaruh terhadap moderasi beragama, yang berbeda dengan temuan lain tentang adanya efek buruk religiusitas khususnya dimensi ritual terhadap toleransi beragama baik internal maupun eksternal (Subchi et al., 2022). *Kelima*, Wolhuter menyarankan untuk mengembangkan model koeksistensi pandangan dunia dan kehidupan (Wolhuter et al., 2014), model ini mengevaluasi inklusivisme, universalisme, dan pluralisme yang memiliki kekurangan.

Dari riset sebelumnya (*research gap*) dan perkembangan wacana moderasi beragama, peneliti mengembangkan kebaruan dengan memasukkan *intellectual humility* untuk dipertimbangkan sebagai mediasi moderasi beragama dengan toleransi. Beberapa penelitian terbaru secara lebih spesifik menemukan pengaruh Intellectual humility terhadap toleransi beragama. Kerendahan hati dan toleransi adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016). Keterbukaan dan keluwesan dalam berpikir juga memudahkan individu untuk melihat dari sudut pandang orang lain, dengan demikian, *Intellectual Humility* lebih mudah terbentuk, dan memperkuat sikap toleransi (Church & Samuelson, 2016; Leary et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator model moderasi beragama untuk menguatkan sikap toleransi dengan mediasi *intellectual humility* dan mendesain model moderasi beragama untuk menguatkan sikap toleransi dengan mediasi *intellectual humility*. Moderasi beragama menjadi isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia, dan menjadi salah satu agenda krusial dalam melawan berbagai aksi intoleransi yang dapat terjadi pada sebuah negara multikultural terbesar di dunia seperti Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Moderasi Beragama

Islam moderat adalah nilai pemersatu bangsa Indonesia yang sejak awal memiliki semangat untuk memelihara warna lokal sebagai kekuatan bangsa [24]. Islam moderat berasal dari istilah *wasathiyah* asal katanya adalah *wasath* [18], terkadang juga diterjemahkan sebagai *sawa'un* yang berarti bagian tengah, atau keadilan. Kata *wasathiyah* sama dengan tiga ciri utama Islam, yakni: *tawasuth*/tengah, *ta'adul*/adil, dan *tawazun*/seimbang [25], maka moderasi beragama berarti menempatkan diri berada di tengah, dalam melihat dan menyelesaikan persoalan [18]. Moderasi beragama berarti menempatkan posisi di tengah, di antara sikap ekstrim kanan dan kiri serta menghormati praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan secara inklusif [26], [27]. Tujuan moderasi beragama adalah menciptakan suasana yang toleran, damai, dan rukun dalam beragama dan berbangsa serta menopang kehidupan multikultural [18]. Moderasi beragama memiliki minimal 3 (tiga) indikator yang melekat di dalamnya, yaitu:

2.1.1. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Salah satu ciri dari Islam moderat adalah mengakomodasi konsep negara-bangsa modern [28], sedangkan sikap ekstrim dan cenderung radikal ditunjukkan dengan menolak bendera dan lagu kebangsaan serta memiliki emosional yang kuat diantara anggota kelompok dibanding keluarga dan masyarakat [29]. Komitmen kebangsaan adalah salah satu wujud dari kecintaan terhadap tanah air dengan semua kebudayaan yang ada di dalamnya.

2.1.2. Anti kekerasan

Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama, dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan atas nama agama. Secara faktual, terjadi peningkatan kekerasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia setelah reformasi. Pada tahun 2010 terdapat 81 kasus, yang direkam hanya dari beberapa daerah di Indonesia [30], tahun 2015 ada 85 kasus tahun 2016 sebanyak 97 kasus [31]. Pada situasi ini, agama tampil sebagai kekuatan daya penyatu (*sentripetal*), yang dapat meleburkan ikatan primordial, tetapi di sisi lain agama juga dapat sebagai kekuatan daya pemecah belah (*sentrifugal*), yang dapat memecah persatuan, agama dapat sebagai faktor pemersatu juga merupakan faktor yang membahayakan persatuan bangsa jika ditafsirkan salah [32].

2.1.3. Akomodatif terhadap budaya lokal

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Masyarakat Indonesia

kaya dengan budaya lokal yang dimanfaatkan untuk beradaptasi dan mengatur sumberdaya untuk kesejahteraan bersama [33], sering dikaitkan dengan mitos padahal ia tumbuh dinamis mengikuti inovasi dan kreativitas manusia [34]. Budaya lokal sangat penting direvitaliasi dengan memperkuat toleransi terhadap berbagai khasanah nusantara.

2.1.4. Toleransi

Toleransi adalah sikap terbuka untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Di Indonesia, banyak rumah ibadah semisal masjid yang didirikan oleh umat lain Hindu-Buddha dengan budaya gotong royong [35], sehingga berkembang menjadi simbol harmonisasi dan toleransi [36]. Setara Institute mencatat bahwa dalam perancangan dan penerapan RPJMD pada 94 kabupaten dan kota di Indonesia, belum semua menerapkan inklusivitas, yakni pernyataan tegas dukungan pemerintah kota terhadap toleransi, anti diskriminasi, penghargaan keberagaman, dan kesetaraan [37]. Toleransi beragama memegang peranan penting untuk terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya yang majemuk.

2.1.5. Intellectual Humility

Kerendahan hati intelektual diidentifikasi sebagai salah satu karakter positif yang memungkinkan individu untuk mengenali potensi kesalahan dalam setiap pendapat dan sikap, dan kemudian merevisi sikapnya. Tidak ada definisi psikologis tunggal yang diterima secara universal tentang kerendahan hati intelektual. Namun, kesadaran potensi kelemahan keyakinan seseorang mungkin dianggap sebagai inti dari konstruksi teoretis ini [38]

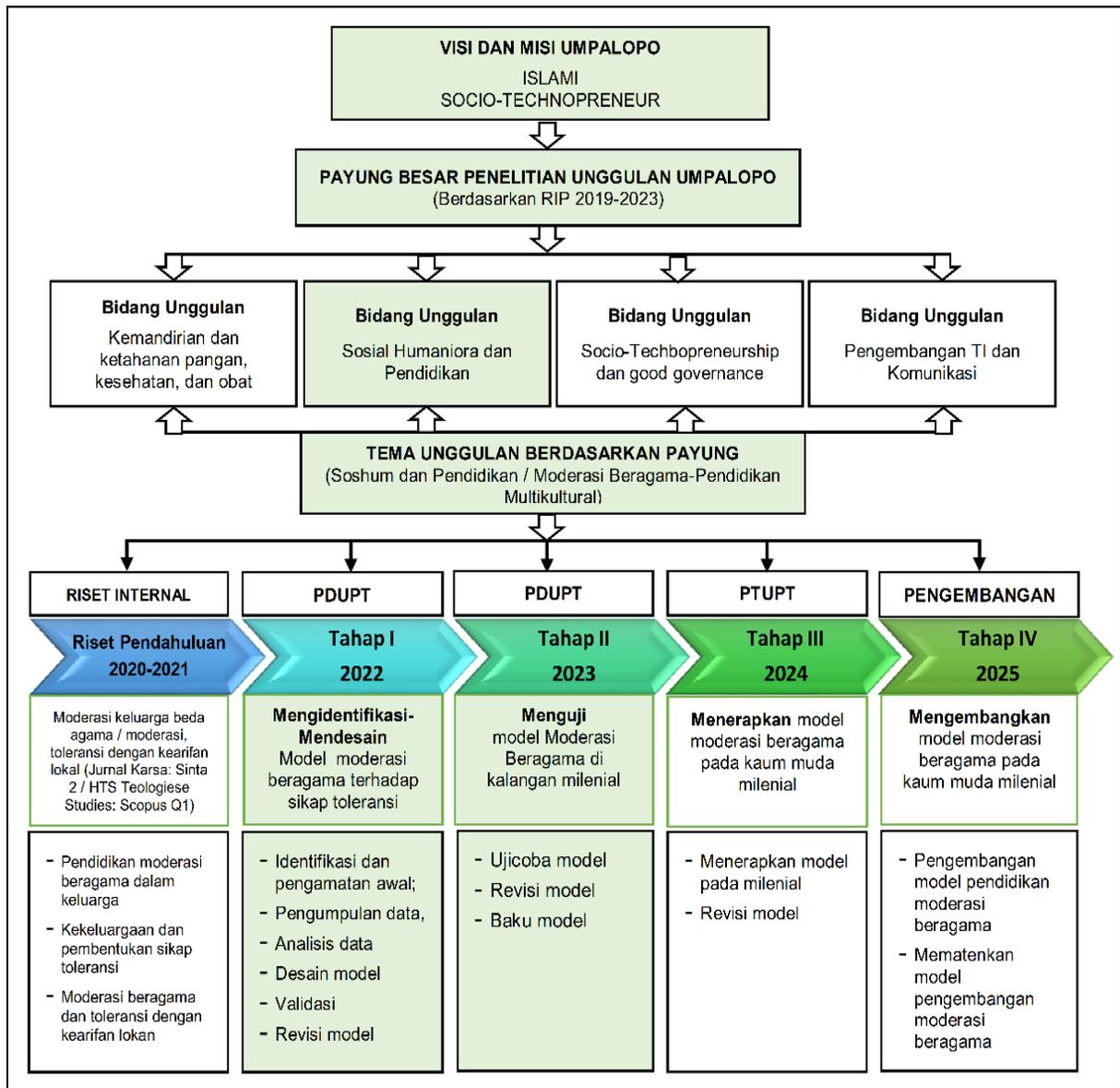
Oleh karena itu, kerendahan hati intelektual sangat penting untuk menghindari bias konfirmasi ketika menalar tentang bukti dan mengevaluasi keyakinan [39]. Hasil riset menemukan, pada kelompok dengan *intellectual humility* beragama yang tinggi, ditemukan korelasi positif antara keberagaman dengan toleransi beragama. Artinya, semakin individu dengan *intellectual humility* beragama tinggi, toleransi beragamanya juga cenderung semakin tinggi. Sebaliknya, pada kelompok dengan *intellectual humility* agama rendah, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara paparan keberagaman agama dengan toleransi beragama [40]. Menjadi sangat menarik menempatkan *intellectual humility* sebagai variabel mediasi terhadap toleransi, dan sebagai novelty penelitian ini.

2.1.6. Pengembangan Model Moderasi Beragama

Pada tahun I (pertama) penelitian ini dirancang untuk mendesain model moderasi beragama. Kontruksi variabel adalah tahap awal dalam menyusun model baru, sebagai tahapan krusial dalam penyusunan model. Peneliti menggunakan dua cara untuk menyusun konstruksi variabel, yaitu: (i) *Confirmatory factor analysis*, berdasarkan penelitian sebelumnya dengan mengandalkan research gap; dan (ii) *Exploration factor analysis*, benar-benar menyusun model baru tanpa replikasi temuan sebelumnya. Pada tahap ini digunakan Nvivo, untuk membuat daftar nominasi variabel. Sumber data umumnya merujuk jurnal terdahulu, konfirmasi para ahli, atau pendapat responden, serta SPSS (versi 24), daftar nominasi yang ditemukan selanjutnya dibuat pengelompokan antara variabel dan indikator yang mungkin.

Peneliti mengembangkan tema dari *road map* penelitian Universitas Muhammadiyah Palopo yang diharapkan dapat berjalan pada tahun 2022-2023. Tiga hal penting yang diuraikan

dalam *road map*; (i) penelitian yang telah dilakukan; (ii) penelitian yang akan dilakukan; dan (iii) rencana penelitian berikutnya yang akan memandu peneliti mencapai tujuan akhir dari penelitian yang menjadi fokusnya. Berikut digambarkan roadmap penelitian sebagai kontribusi terhadap pencapaian RIP Universitas Muhammadiyah Palopo, yakni:



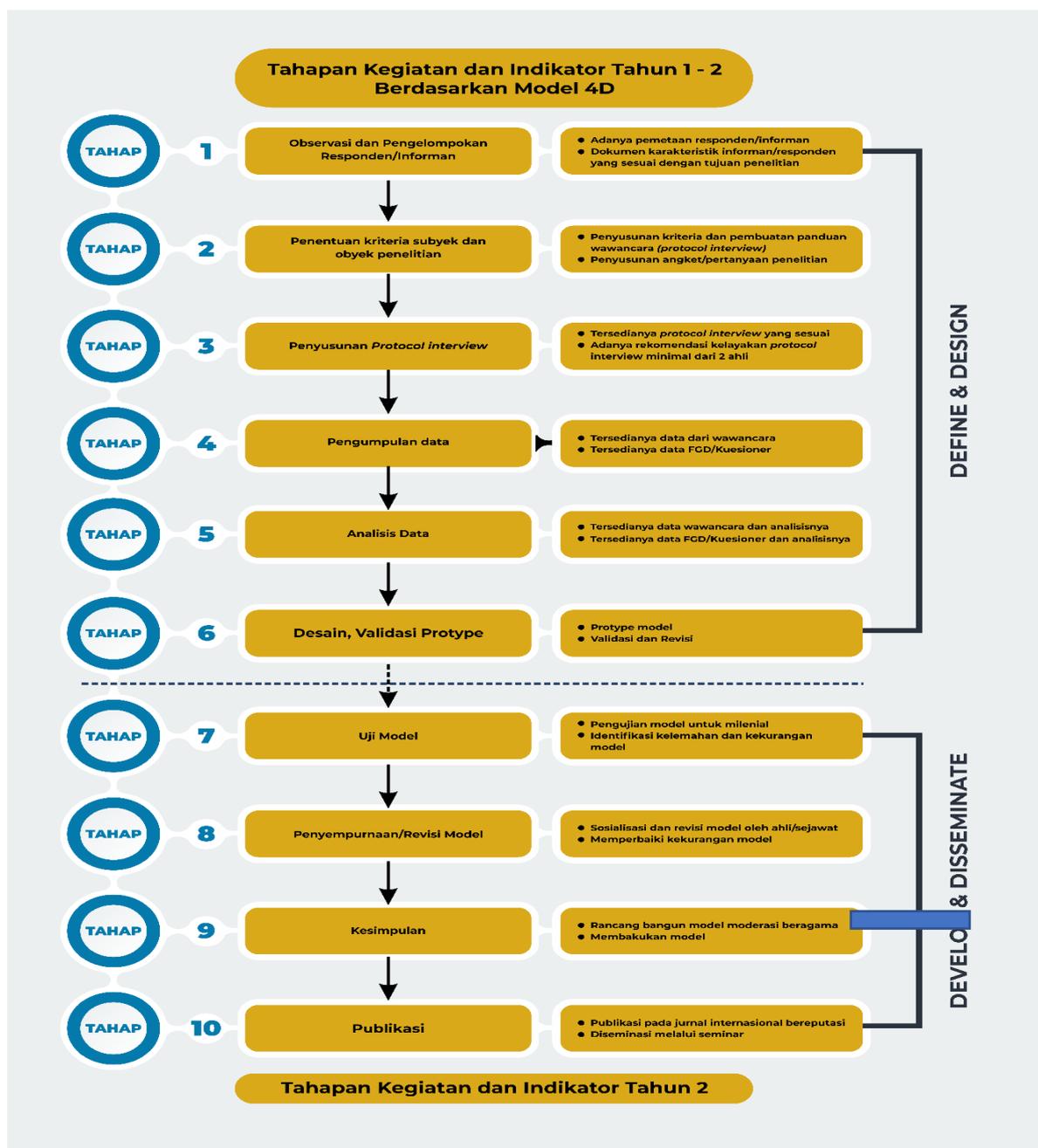
Gambar 1. Roadmap Penelitian

Pada gambar 1. peneliti telah melakukan studi pendahuluan (2020-2021), yang terkait dengan pengamalan keberagamaan yang moderat, dibiayai internal. Pada tahun 2022, peneliti fokus pada **identifikasi dan mendesain** model moderasi beragama di kalangan milenial. Pada tahun 2023 dilanjutkan dengan **menguji model** moderasi beragama, sehingga dihasilkan model yang kompatibel dengan kehidupan kaum muda milenial. Sedangkan pada tahun 2024 peneliti akan melanjutkan pada **Riset Terapan** untuk penerapan model. Pada tahun 2025 dilanjutkan menjadi riset pengembangan untuk mengembangkan model pada ranah yang lebih luas.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) tahun melalui 9 (sembilan) tahapan dengan demikian jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan (R & D) yang bersifat longitudinal [41]. Secara umum penelitian ini akan melakukan proses identifikasi, mendesain model, dan menguji model [42]. Pada tahun pertama digunakan penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan metode dan tahapan penelitian pengembangan. Pada tahun kedua, menggunakan jenis penelitian kuantitatif-deskriptif, menggunakan metode eksperimen (*experimental method*), karena sudah masuk tahapan mendesain dan menguji model. Siklus Penelitian selama 2 tahun sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan dan Indikator Penelitian

Pentahapan dan rincian kegiatan yang akan dilakukan pada tahun I (pertama) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahap 1: observasi dan pengelompokan Informan/informan. Rincian kegiatan pada tahap ini: (i) pengenalan peneliti terhadap objek/ sasaran penelitian; (ii) pengenalan terhadap aktivitas informan; dan (iii) pengenalan terhadap kelompok sasaran. Tahap 2: Penyusunan kriteria subjek berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh melalui observasi menjadi dasar penyusunan kriteria dan pembuatan panduan wawancara (*protocol interview*), dan angket panduan pertanyaan penelitian disusun dengan fokus untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan subjek terkait pengetahuan tentang moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, anti kekerasan, budaya lokal, toleransi, dan *intellectual humility*.

Tahap 3: Uji dan Revisi *Interview Protocol*. Penelitian kualitatif sebetulnya tidak sepenuhnya bersandar kepada instrumen tertentu dalam koleksi data seperti penelitian kuantitatif. Namun demikian peneliti tetap membuat panduan penelitian (*interview protocol*) agar ketika wawancara tidak bias. Panduan ini setelah dilakukan uji coba, perlu ada penelaahan yang komprehensif oleh rekan sedisiplin ilmu. Tahap 4: Pengumpulan Data. Implementasi koleksi data di lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan *focus group discussion* (FGD) di 3 kawasan (Indonesia barat, tengah, dan timur).

Tahap 5: Analisis Data. Tahap analisis data dilakukan dengan bantuan NVIVO software dan atau analisis tematik. Hasil analisis data ini menjadi dasar untuk menjawab model moderasi beragama yang cocok dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Tahap 6: Desain awal dan validasi model. Mendesain prototype model moderasi beragama yang sesuai dengan kaum muda milenial. Model kemudian disosialisasikan dan direvisi sesuai dengan saran dari para ahli.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif untuk menggambarkan fenomena dari aspek kondisi alamiah, secara holistik, dan berusaha menemukan makna [43]. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut [44]. Karena jangka waktunya lama (2 tahun), maka digunakan *Research and Development* (R & D). Pengembangan model mengacu pada model 4-D yang terdiri dari empat tahap, yaitu: (i) pendefinisian (*define*), perancangan (*design*), pengembangan (*develop*) dan tahap penyebaran (*disseminate*). Pada tahun 1 (2022) tahapan penelitian hanya pada; (i) *define*; dan (ii) *design*.

Pendekatan yang digunakan adalah model *Discovering Cultural Themes*, untuk memahami gejala khas dari analisis sebelumnya. Analisis ini mengumpulkan berbagai tema, fokus budaya, nilai, dan simbol budaya yang ada di setiap domain [45]. Penggunaan analisis budaya dan sosial paling tepat untuk evaluasi dan kontrol, karena pemahaman tentang masyarakat nasional adalah salah satu komponen yang dapat dirujuk oleh seluruh proses kerjasama.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh [46]. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain [44]. Untuk kebutuhan data dari

kuisisioner digunakan *purposive sampling*, jenis pengambilan sampel non-probabilitas yang paling efektif untuk mempelajari domain budaya tertentu dengan ahli yang berpengetahuan di dalamnya dan dengan memastikan keandalan dan kompetensi informan [47], selain itu, informan juga diidentifikasi menggunakan *snowball sampling*. Jumlah yang ditetapkan adalah sebanyak 350 orang dipilih secara proporsional mewakili informan Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Data kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) ditetapkan sebanyak 350 informan. Dengan rincian, mahasiswa dari pulau Jawa sebanyak 100 orang, Sulawesi sebanyak 150 orang, dan Papua sebanyak 100 orang. Untuk memperkaya data, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pakar moderasi beragama yang berasal dari rumah moderasi UIN/IAIN sebanyak 3 orang.

3.4. Materi FGD

Penggunaan item pengukuran yang sudah ada umumnya dianggap praktik yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan pengembangan yang baru, mengingat kompleksitas pengembangan skala [48], [49]. Peneliti menggunakan skala pengukuran yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Kuisisioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 poin dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Data tersebut kemudian diperkaya dengan FGD dengan pertanyaan terbuka yang akan melibatkan kaum muda muslim milenial dan para ahli yang memiliki kepakaran dengan tema moderasi beragama.

Tabel 1. Materi Focus Group Discussion

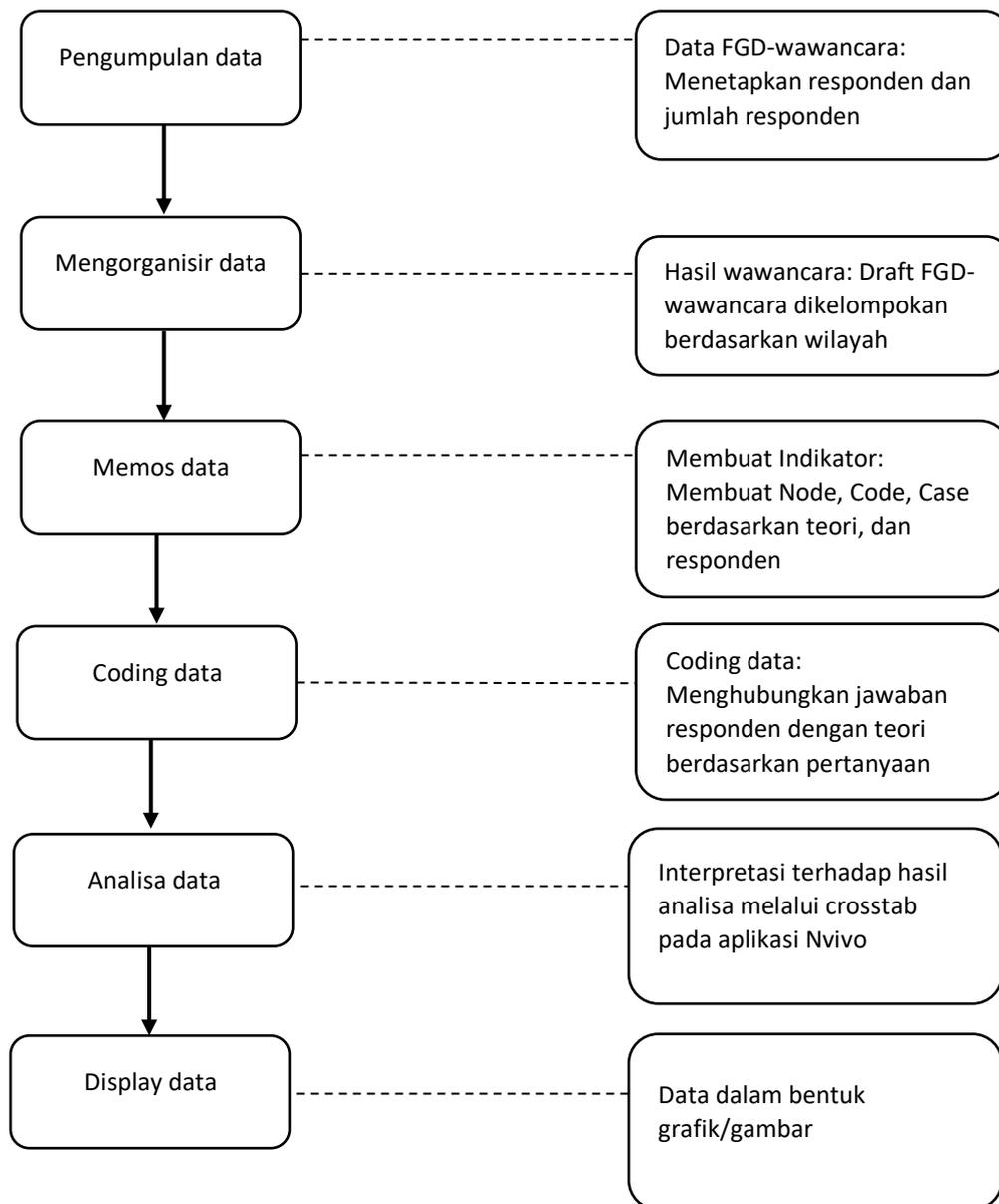
Construct	Item	Indicator
Komitmen Kebangsaan [50]	• Pancasila adalah ideologi negara yang harus diterima semua warga negara	KK-1
	• Demokrasi Sebagai Ideologi Politik Indonesia	KK-2
	• Pancasila sesuai dengan ajaran agama Islam	KK-3
	• Penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2% maka sewajarnya mendirikan negara Khilafah, yang menerapkan Islam sebagai Ideologi, dan syari'at sebagai dasar hukumnya	KK-4
	• Berdiri sembari memberi penghormatan pada bendera Merah Putih merupakan hal yang berlebihan bahkan bisa terjerumus pada kesyirikan?	KK-5
Anti kekerasan [50]	• Agama Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam bentuk apapun	AK-1
	• Merusak rumah ibadah agama lain yang ilegal adalah sikap wajar dalam bingkai demokrasi kita	AK-2
	• Membela agama dengan cara kekerasan	AK-3
	• Rela melakukan tindak kekerasan atas dasar untuk membela agama	AK-4
	• Menjadi penengah suatu konflik yang terjadi di lingkungan pertemanan	AK-5
Akomodatif terhadap kebudayaan lokal [50]	• Menghargai keragaman budaya lokal	ABL-1
	• Apabila kebudayaan lokal bertentangan dengan agama saya, maka saya tetap menghargai budaya tersebut	ABL-2
	• Bersikap toleransi dengan banyak kebudayaan adalah	ABL-3

Construct	Item	Indicator
	tindakan yang tepat	
	• Apabila kebudayaan lokal bertentangan dari agama saya, maka saya tetap menghargai budaya tersebut	ABL-4
	• Senang melihat rumah ibadah yang bertema budaya tertentu (seperti: masjid bergaya kelenteng, gereja berkubah, dan lainnya)	ABL-5
	• Merasa nyaman dengan keberadaan kelompok agama lain	TL-1
	• Merasa nyaman dengan keberadaan kelompok/aliran/organisasi keagamaan lain dalam Islam	TL-2
Toleransi [51]	• Mendukung adanya pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggal saya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	TL-3
	• Yakin bahwa orang yang berbeda agama dapat menjadi warga negara yang baik	TL-4
	• Yakin bahwa orang yang berbeda aliran/mazhab dapat menjadi warga negara yang baik	TL-5
Intellectual Humility [52]	• Merasa tersinggung jika ada yang tidak sependapat	IH-1
	• Terbuka untuk merevisi apa yang saya yakini dalam menerima informasi baru	IH-2
	• Menyambut berbagai sudut pandang yang berbeda untuk melihat topik pembahasan penting	IH-3
	• Rela belajar kepada yang status sosialnya lebih rendah, walaupun memiliki jabatan	IH-4
	• Kesiapan belajar dari orang lain jika tidak mengetahui suatu topik	IH-5
	• Tidak mementingkan kepintaran dari orang lain	IH-6

Peneliti telah melakukan uji pilot kepada 45 responden/informan dan seluruh item telah memenuhi Analisis CFA dengan program smartpls terdiri dari beberapa tahap yaitu pengujian *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

3.5. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; *pertama*, pengembangan bahan dan instrumen dari penelitian sebelumnya dengan melibatkan pakar di dengan tujuan untuk memastikan kejelasan konten dan validitas isi instrumen [53]. *Kedua*, melakukan uji pra kuisisioner yang melibatkan 40 informan dari perguruan tinggi. Aspek penting yang menjadi pengamatan adalah kemungkinan kesalahan pengukuran [49], [54]. Berikut dikemukakan secara rinci prosedur pengumpulan dan analisis data, pada gambar 2.



Gambar 3. Prosedur Penelitian dan Analisis Data

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif analitik, pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan objek penelitian secara baik. Tetapi selama ini penelitian qualitative dipandang sebagai cara yang kaku karena tidak dapat menguraikan data secara jelas meskipun dengan analisisnya kuat. Oleh karena itu penelitian ini mempromosikan pendekatan qualitative analytic robust dengan menggabungkan pendekatan qualitative data analytic (QDA).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak untuk kualitatif yang sangat dibutuhkan dalam mengelola data yang ditemukan dari lapangan, dalam hal ini nVivo 12 plus. NVivo adalah alat untuk mengolah data kualitatif melalui penyorotan, menulis catatan, dan menghubungkan ide [55]. Nvivo 12 plus merupakan software yang dikembangkan oleh Qualitative Solution and Research (QSR) International, sebagai Qualitative Data Analysis Software (QDAS) [56] [57], Nvivo sebagai *computer assistance programming* [58], untuk mengolah data kualitatif melalui proses coding terhadap data dengan menghubungkan dengan indikator penelitian [55]. NVivo merupakan software analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Qualitative Solution and Research (QSR) International [59]. Agar dapat

memenuhi proses analisa data maka penelitian ini menggunakan pendekatan tahap analisa data menurut [60], sehingga tahap analisa menggunakan Nvivo terdiri dari; (1) *collecting data*, (2) *organizing data*, (3) *making memos*, (4) *coding data*, (5) *analyzing data*, dan (6) *displaying data* [60]. Dengan tahapan ini diharapkan mampu menghasilkan output data yang benar-benar sesuai dengan tema riset.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1. Hasil Yang Dicapai

4.1.1. Target dan Capaian Penelitian Tahun 1

Secara keseluruhan, penelitian ini dijadwalkan selama 2 (dua) tahun melalui pendekatan *Research and Development* (R&D). Setiap tahun ditetapkan rencana dan target capaian sebagaimana yang tertera dalam proposal penelitian. Pada tahun pertama, terdapat dua tahapan sesuai dengan siklus R&D, yakni *Define* dan *Design*. Capaian penelitian tahun pertama hingga laporan kemajuan ini disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target dan Capaian Penelitian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan	Pencapaian
1	Observasi dan Pengelompokan Informan/Informan	Adanya pemetaan informan/informan	100%
		Dokumen karakteristik informan/informan yang sesuai dengan tujuan penelitian	100%
2	Penentuan kriteria subyek dan obyek penelitian	Penyusunan kriteria dan pembuatan panduan wawancara (protocol interview),	100%
		Penyusunan angket/pertanyaan penelitian	100%
3	Penyusunan Protokol Review	Tersedianya interview protocol yang sesuai.	100%
		Adanya rekomendasi kelayakan interview protokol minimal dari 2 ahli	100%
4	Pengumpulan data	Tersedianya data dari wawancara	100%
		Tersedianya data FGD	100%
5	Analisis Data	Tersedianya transkrip data wawancara dan interpretasinya	100%
6	Desain, Validasi Prototype Model	Prototype model, Validasi dan Revisi	70%
7	Luaran	Artikel	60%

4.1.2. Hasil Analisis

Penelitian ini menguraikan informasi temuan berupa karakteristik demografi kaum milenial yang menjadi informan, data moderasi beragama, toleransi, dan intellectual humility. Pada tahapan ini data dan informasi yang digunakan bersumber dari hasil observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan informan. Selain itu untuk memastikan akurasi validitas dari data dan informasi yang dikumpulkan, tim peneliti juga mewawancarai beberapa ahli yang berkompeten terhadap tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui FGD kemudian ditranskrip, dikelompokkan berdasarkan wilayah, ditetapkan Indikator: membuat node, code, case berdasarkan teori, dan responden, proses coding, analisis dan display data. Proses ini secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.

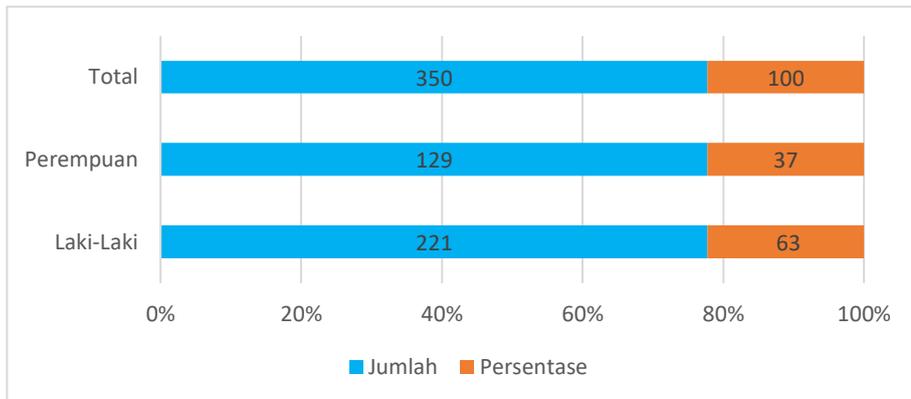
4.1.2.1. Karakteristik Demografi Informan

Penelitian ini menguraikan informasi temuan berupa karakteristik demografi kaum milenial yang menjadi informan. Peneliti telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)

di kawasan Indonesia bagian barat (Bogor, Bandung, Jakarta), Indonesia bagian tengah (Palopo, Masamba, Toraja, Manado), dan kawasan timur Indonesia (Sorong). Berikut ini diuraikan data demografi informan.

4.1.2.1.1. Jenis Kelamin

Peneliti menargetkan jumlah informan laki-laki dan perempuan secara proporsional, dan untuk informan perempuan minimal 30 persen. Berikut ini diuraikan demografi informan berdasarkan jenis kelamin, pada gambar 1.

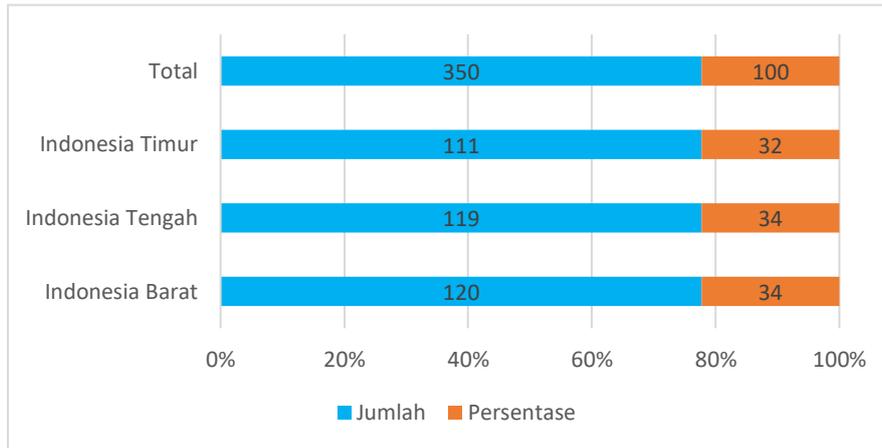


Gambar 1. Demografi informan berdasarkan jenis kelamin

Pada gambar 1. total jumlah informan yang mengikuti FGD sebanyak 350 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 221 orang (63%), dan perempuan sebanyak 129 orang (37%). Dari jumlah tersebut, maka informan perempuan telah melebihi 30 persen sebagaimana target dalam penelitian ini. Keterlibatan perempuan dalam penelitian ini sangat penting untuk melihat bagaimana kaum muda muslim melihat moderasi beragama dan kaitannya dengan intellectual humility. Pada beberapa kasus, perempuan terseret dalam pusaran radikalisme baik kelompok yang rentan terpapar, sebagai korban, maupun sebagai pelaku. Masih menguatnya budaya patriarki juga menjadi faktor yang krusial. Perempuan harus menurut apapun yang dilakukan oleh suaminya, dan mengalami ketergantungan utamanya dari sisi ekonomi. Padahal pada beberapa kasus juga, perempuan mampu menjadi motor penggerak dalam menerjemahkan keadilan, empati dan rasionalitas dalam beragama dengan membangun relasi dengan agama lain. Sikap ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengandung aspek moderat, akomodatif dan toleran [8]. Selain itu, budaya telah mendorong perempuan untuk membaaur dan membentuk kesetaraan egaliter dalam ranah sosial dan budaya. Budaya kedermawanan dan gotong royong sudah menjadi tradisi baik dalam kegiatan keagamaan maupun adat.

4.1.2.1.2. Sebaran Daerah Informan

Informan dalam penelitian ini ditetapkan untuk mewakili secara proporsional kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Berikut diuraikan sebaran informan berdasarkan wilayah sebagaimana pada gambar 2.

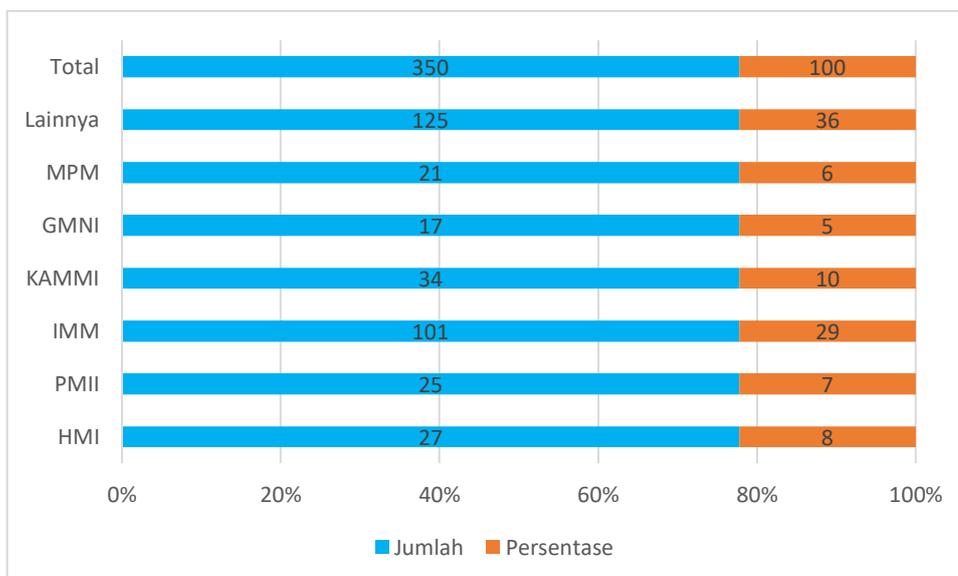


Gambar 2. Demografi informan berdasarkan wilayah

Pada gambar 2. jumlah informan sebanyak 350 yang terdiri dari bagian barat sebanyak 120 orang (34%), bagian tengah sebanyak 119 orang (34%), dan kawasan timur sebanyak 111 (32%). Dengan demikian informan telah mewakili tiga kawasan di Indonesia dan secara proporsional telah tersebar merata. Sebaran ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing informan sehingga secara utuh dapat menggambarkan bagaimana keberagaman mereka dalam kaitannya dengan toleransi dan intellectual humility.

4.1.2.1.3. Latar Belakang Organisasi Ekstra

Kaum muda milenial adalah generasi muda yang aktif dalam mengembangkan dirinya baik di dalam maupun luar kampusnya. Biasanya mereka mengidentifikasi dirinya sebagai kontrol sosial dan agen pembaharu yang harus memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Sehingga para milenial sangat aktif dalam melakukan pembelaan sosial melalui organisasi yang mereka geluti. Berikut diuraikan latar belakang organisasi ekstra kampus informan sebagaimana pada gambar 3.



Gambar 3. Latar belakang organisasi ekstra informan

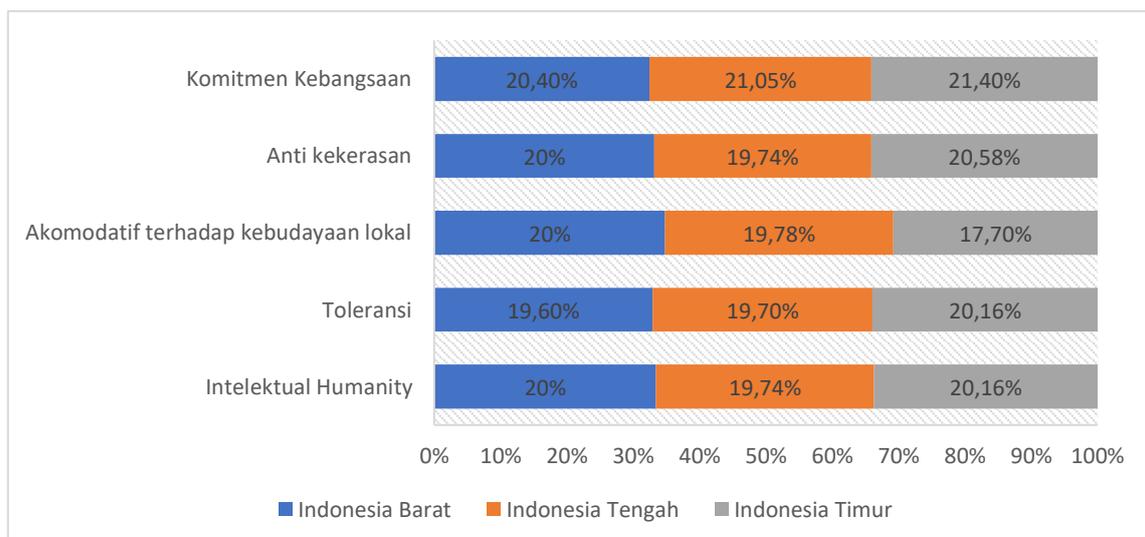
Pada gambar 3. informan penelitian ini berasal dari organisasi ekstra kampus yang beragam, yakni HMI sebanyak 27 orang (8%), PMII sebanyak 27 orang (7%), IMM 101 orang

(29%), KAMMI 34 orang (10 %), GMNI 17 orang (5%), MPM 21 orang (6%), dan organisasi lainnya sebanyak 125 orang (36%).

4.1.2.2. Analisis Data Moderasi Beragama Kaum Muda Muslim Indonesia

Hasil temuan penelitian ini mengidentifikasi cara pandangan kaum muda muslim terhadap sikap toleransi, sikap ini diambil dari prespektif beragama masyarakat Indonesia yang mengedepankan pandangan wasatiah yang mengajarkan prinsip beragama yang moderat. Sehingga pandangan ini prinsip dan nilai masyarakat Indonesia dalam bersikap terutama terhadap nilai pluralisat. Kami memahami bahwa masyarakat Indonesia yang multi kultur memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap pluralitas itu sendiri, sehingga penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat Indonesia khususnya kaum muda terhadap sikap toleransi dan nilai moderat

Dari temuan tersebut, penelitian ini telah mengidentifikasi sikap moderasi kaum muda Indonesia. Penelitian ini membagi sikap moderasi menjadi lima yaitu; komitmen kebangsaan, sikap anti kekerasan, sikap akomodasi terhadap kebudayaan lokal, sikap toleransi dan sikap intellectual humanity kaum muda. Indetifikasi jawaban informant terhadap pertanyaan tentang moderasi beragam menunjukkan beberapa karakter jawaban dari masing-masing informan yang mewakili wilayah masing-masing. Informan Indonesia bagian barat menunjukkan bahwa sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (20,40%), sikap anti kekerasan, akomodasi terhadap kebudayaan lokal, dan intelektual humanity memiliki persentase (20%), sedangkan sikap toleransi (19,60%). Indonesia bagian tengah dengan persentase sikap komitmen kebangsaan (21,05%), sikap anti kekerasan (19,74%), akomodasi terhadap kebudayaan lokal (19,78%), sikap toleransi (19,70%), dan intelektual humanity dengan persentase (19,74%). Sedangkan Indonesia bagian timur, sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (21,40%), sikap anti kekerasan (20,58%), sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal (17,70%), sikap toleransi (20,16%), dan intellectual humanity 20.16%).



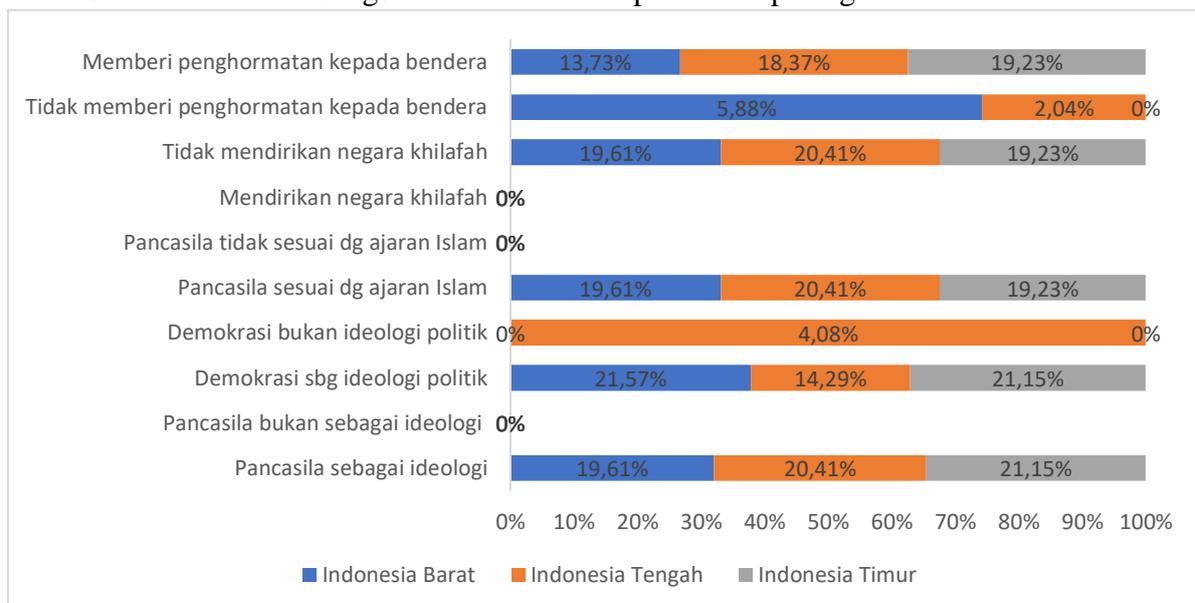
Gambar 1. Moderasi Beragama Kaum Muda Muslim Indonesia

Gambar 1, menunjukan sikap masing-masing informan berdasarkan pembagian wilayah. Indonesia bagian barat memiliki sikap moderasi dengan nilai sama, jika dilihat dari lima parameter dalam penelitian, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai yang stabil dibandingkan

dengan Indonesian bagian tengah. Indonesia bagian timur dengan nilai persentase tinggi (21,05%) pada komitmen kebangsaan, empat sikap moderasi lainnya cenderung rendah terutama pada sikap toleransi dengan nilai 19,70%). Indonesia bagian timur memiliki karakter yang cukup berbeda pada sikap moderasi dilihat dari nilai yang cukup variatif dengan nilai paling rendah (17,70%) akomodasi terhadap kebudayaan lokal, sedangkan sikap lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan sikap moderasi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah.

4.1.2.2.1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Tanpa adanya komitmen kebangsaan dari warga yang konsisten, maka negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya. Komitmen kebangsaan terkait dengan sikap kaum muda terhadap simbol-simbol negara dan konsensus dasar yang menjadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Komitmen kebangsaan kaum muda dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Sikap Komitmen Kebangsaan

Gambar 2, Komitmen kebangsaan terdiri dari; memberikan penghormatan kepada bendera, Tidak mendirikan negara khilafah, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, demokrasi sebagai ideologi politik dan, Pancasila sebagai ideologi yang harus diterima warga negara. Dari lima pertanyaan tersebut informan Indonesia bagian barat menilai perlu memberikan penghormatan kepada bendera (13,73%) sedangkan sikap tidak memberikan penghormatan dengan nilai (5,88%) respon ini jika memberikan penghormatan dianggap sebagai bentuk kesyirikan, pancasila sesuai dengan ajaran Islam (19,61%), demokrasi sebagai ideologi politik (21,57%), dan Pancasila sebagai ideologi (19,61%).

Indonesia bagian barat memberikan penghormatan kepada bendera (18,73%) sedangkan sikap tidak memberikan penghormatan dengan nilai (2,88%) jawaban ini sebagai bentuk cinta tanah air, tidak mendirikan negara khilafah dan pancasila sesuai dengan ajaran Islam dengan persentase (20,41%), demokrasi tidak sesuai dengan ideologi politik (4,08%) pernyataan ini didasari oleh sikap ragu terhadap sistem politik Indonesia yang masih bermasalah dan cenderung koruptif, sedangkan informan lainnya menilai demokrasi sebagai ideologi politik

(14,29%), sedangkan Pancasila sebagai ideologi politik (20,41%). Indonesia bagian timur, memberikan penghormatan kepada bendera (19,23%), tidak mendirikan negara khilafah dan pancasila sesuai dengan ajaran Islam dengan persentase (19,23%), demokrasi sebagai ideologi politik dan pancasila sebagai ideologi dengan persentase (21,15).

4.1.2.2.2. Sikap Anti Kekerasan

Anti kekerasan adalah salah satu pilar moderasi beragama yang harus dimiliki oleh kaum muda. Bahkan saat ini berkembang pendidikan tanpa kekerasan bisa disebut juga dengan pendidikan damai, pendidikan yang dilakukan dengan sepenuh hati mendidik bukan mengajar. Keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan yang damai dapat dilakukan antara lain dengan memahami penyebab kekerasan dalam masyarakat, yaitu mengenal lebih dalam kondisi sosial yang bisa menyebabkan perilaku kekerasan, dan mengkaji suasana kekerasan yang mampu menimbulkan perilaku kekerasan. Berikut diuraikan bagaimana sikap kaum muda milenial terhadap anti kekerasan sebagaimana pada gambar 3.



Gambar 3. Sikap Anti Kekerasan

Gambar 3, sikap anti kekerasan menunjukkan respon kaum muda terhadap kondisi sosial yang terjadi disekitarnya, untuk mengetahui respons tersebut maka penelitian ini mengidentifikasi gejala sosial yang terjadi dengan menjadikannya sebagai pertanyaan turunan. Dari respon tersebut Indonesia bagian barat; tidak menjadi penengah konflik (4%) sikap ini didasari oleh skeptisisme informan dan bentuk konflik yang terjadi, menurut informan ia akan menjadi penengah konflik jika konflik dengan skala besar. Sedangkan menjadi penengah konflik (16%), tidak rela melakukan Tindakan kekerasan (18%), dan rela melakukan tidak kekerasan jika kondisi tersebut mengharuskan informan terlibat secara fisik. Membela agama dengan cara nirkekerasan (18%) sedangkan membela agama dengan cara kekerasan (2%) apabila kondisi tersebut memaksa terjadi kekerasan. Tidak merusak rumah ibadah yang ilegal (20%), agama tidak mengajarkan cara kekerasan (20%).

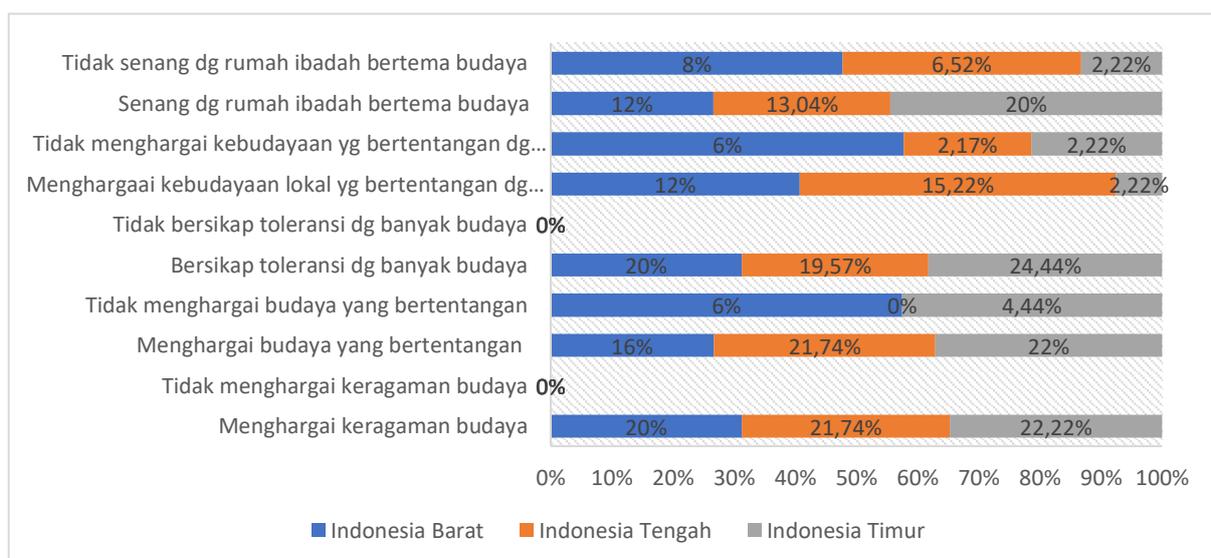
Dari respon tersebut Indonesia bagian tengah; tidak menjadi penengah konflik (4%) sikap ini didasari oleh rasa skeptis informan dan bentuk konflik yang terjadi, menurut informan ia akan menjadi penengah konflik jika konflik dengan skala besar. Sedangkan menjadi penengah

konflik (16%), tidak rela melakukan Tindakan kekerasan (18%), dan rela melakukan tidak kekerasan jika kondisi tersebut mengharuskan informan terlibat secara fisik. Membela agama dengan cara nirkekerasan (18%) sedangkan membela agama dengan cara kekerasan (2%) apabila kondisi tersebut memaksa terjadi kekerasan. Tidak merusak rumah ibadah yang illegal dan agama tidak mengajarkan cara kekerasan (20%). Indonesia bagian timur, menjadi penengah konflik (20%), tidak rela melakukan tindakan kekerasan (20%), membela agama dengan cara nir kekerasan (18%), sedangkan membela agama dengan cara kekerasan (2%), tidak merusak rumah ibadah yang ilegal serta persepsi agama tidak mengajarkan cara kekerasan (20%).

Data tersebut menjelaskan, bahwa kaum muda Indonesia telah menunjukkan sikap positif dalam upaya melawan kekerasan atas nama agama. Kekerasan adalah penyimpangan dari norma perilaku atau sebagai gairah (*passion*), intensitas, atau polaritas sikap [61]. Dalam hal ini ekstremisme kekerasan dapat dijelaskan sebagai keteguhan keyakinan, kesediaan untuk mempertahankan suatu posisi, ketegasan pendapat, dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka cenderung menolak dan memposisikan sebagai penengah dalam setiap konflik.

4.1.2.2.3. Akomodasi terhadap Kebudayaan Lokal

Keanekaragaman budaya lokal merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah. Budaya lokal muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk yang lain. Berpijak pada keragaman budaya di sejumlah daerah tersebut maka munculah kesatuan budaya yang disebut budaya nasional, yang pada dasarnya digali dari kekayaan budaya lokal. Karena itu, pada dasarnya setiap komunitas masyarakat memiliki budaya lokal (*local wisdom*), ini terdapat dalam masyarakat tradisional sekalipun terdapat suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan (*being smart and knowledgeable*). Sikap kaum muda terhadap budaya lokal dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Sikap akomodasi terhadap kebudayaan lokal

Sikap akomodasi adalah bentuk *penerimaan* terhadap masyarakat lainnya, dari hasil wawancara terhadap informan yang tersebar di beberapa provinsi dan kebutapen menunjukkan bahwa sikap kaum muda dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu dari persepsi pribadi

tentang akomodasi dan perbedaan tersebut atau dari luar sehingga membentuk persepsinya sehingga sikap penolakan lebih rendah daripada penerimaan. Dari analisa kami menunjukkan bahwa jawaban informan Indonesia bagian barat menunjukkan karakter yang tidak sama dilihat dari penerimaan terhadap tema rumah ibadah dengan budaya (8%), senang dengan rumah ibadah bertema budaya (12%), tidak menghargai budaya yang bertentangan (6%), menghargai budaya yang bertentangan (12%), bersikap toleransi (20%), tidak menghargai budaya yang bertentangan (6%), menghargai budaya yang bertentangan (16%), dan menghargai keragaman budaya (20%).

Pada informan Indonesia bagian tengah; tidak senang dengan rumah ibadah dengan tema budaya (6,52%), senang dengan rumah ibadah bertema budaya (13,04%), tidak menghargai budaya yang bertentangan (6%), menghargai budaya yang bertentangan (12%), bersikap toleransi (20%), tidak menghargai budaya yang bertentangan (6%), menghargai budaya yang bertentangan dengan agama (16%), dan menghargai keragaman budaya (20%). Sedangkan Indonesia bagian timur dari hasil analisa data menunjukkan bahwa; sikap tidak senang dengan rumah ibadah dengan tema budaya (2,22%), senang dengan rumah ibadah bertema budaya (20%), tidak menghargai budaya yang bertentangan agama (2,22%), menghargai budaya yang bertentangan dengan agama (2,22%), bersikap toleransi (24,44%), tidak menghargai budaya yang bertentangan (4,44%), menghargai budaya yang bertentangan dengan agama (22% %), dan menghargai keragaman budaya (22,22%).

Budaya lokal dalam beberapa studi dapat dimanfaatkan sebagai perekat perbedaan antar agama dan menjadi keunikan di Indonesia [7], [62]. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Masyarakat Indonesia kaya dengan budaya lokal yang dimanfaatkan untuk beradaptasi dan mengatur sumberdaya untuk kesejahteraan bersama[33], sering dikaitkan dengan mitos padahal ia tumbuh dinamis mengikuti inovasi dan kreativitas manusia [34]. Budaya lokal sangat penting direvitaliasi dengan memperkuat toleransi terhadap berbagai khasanah nusantara.

4.1.2.2.4. Sikap Toleransi Kaum Muda

Kaum muda saat ini hidup dalam dinamika yang sangat cepat, terutama dengan berkembangnya teknologi dan informasi digital. Perkembangan ini selain terdapat potensi negatif, juga memiliki dampak positif terhadap cara pandang mereka pada manusia ataupun kelompok yang berbeda. Anak muda Indonesia diharapkan lebih optimis dalam memelihara toleransi terhadap sesama.



Gambar 5. Sikap toleransi kaum muda

Dari temuan terhadap jawaban informan pada sikap toleransi kaum muda menunjukkan bahwa terdapat persepsi dan jawaban yang berbeda-beda tentang toleransi. Informan Indonesia bagian barat menunjukkan bahwa; Yakin terhadap orang yang berbeda aliran/mazhab dapat menjadi warga negara yang baik (9,80%) sedangkan tidak yakin dengan nilai (9,80). Tidak meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (7,84%), meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (11,76%). Tidak mendukung pembangunan tempat ibadah (1,96%), mendukung pembangunan tempat ibadah (17,65%). Tidak merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (1,96%), merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (17,65%). Tidak merasa nyaman dengan kelompok lain (0%) dan merasa nyaman dengan kelompok agama lain (21,57%).

Informan Indonesia bagian tengah menunjukkan bahwa; Tidak meyakini terhadap orang yang berbeda aliran/mazhab dapat menjadi warga negara yang baik (12,24%) meyakini dengan nilai (18,16%). Tidak meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (10,20%), meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (10,20%). Tidak mendukung pembangunan tempat ibadah (6,12%), mendukung pembangunan tempat ibadah (14,24%). Tidak merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (4,08%), merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (16,33%). Tidak merasa nyaman dengan kelompok lain (4%) dan merasa nyaman dengan kelompok agama lain (14,29%).

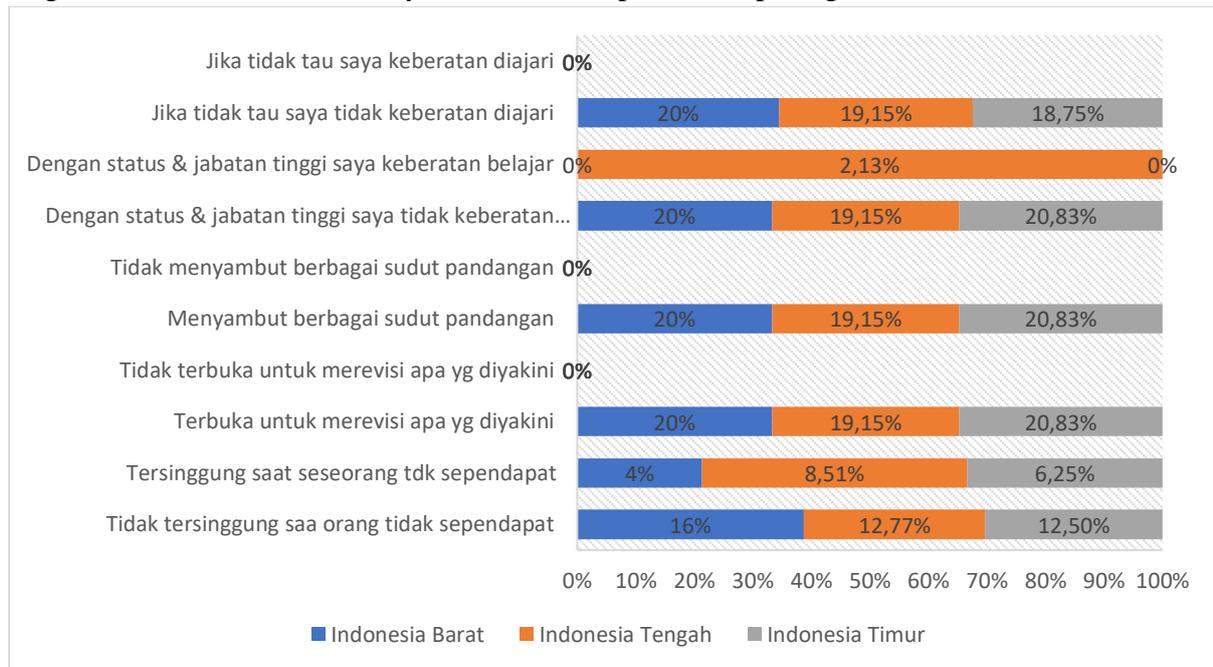
Informan Indonesia bagian timur menunjukkan bahwa; Tidak meyakini terhadap orang yang berbeda aliran/mazhab dapat menjadi warga negara yang baik (4,08%) meyakini dengan nilai (16,33%). Tidak meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (0%), meyakini orang berbeda agama menjadi warga negara yang baik (20,41%). Tidak mendukung pembangunan tempat ibadah (4,08%), mendukung pembangunan tempat ibadah (14,29%). Tidak merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (14,29%), merasa nyaman dengan aliran dan organisasi lain (16,33%). Tidak merasa nyaman dengan kelompok lain (12,24%) dan merasa nyaman dengan kelompok agama lain (8,16%).

Sikap tidak meyakini orang yang berbeda agama tidak menjadi warga negara yang baik karena ada aliran mazhab atau golongan tertentu yang tidak sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga menilai bahwa pandangan kelompok tersebut terbatas dan hanya memandangnya dari satu kacamata agama. Padahal agama-agama di dunia memiliki sumberdaya untuk menghormati kebebasan beragama [63], serta memiliki pandangan universal yang nilainya dapat diterima oleh semua pemeluk agama.

4.1.2.2.5. Sikap Intellectual Humanity Kaum Muda

Intellectual humility atau rasa rendah hati (secara intelektual) sering dianggap sebagai salah satu faktor dari bagaimana seseorang belajar sesuatu yang baru, karena rasa rendah hati melibatkan pengakuan akan keterbatasan seseorang termasuk pengakuan ketidaktahuan akan sesuatu. Sederhananya, untuk belajar lebih banyak seseorang harus mengakui bahwa masih ada hal yang belum diketahuinya. Kerendahan hati juga dikaitkan dengan pembelajaran atau performa akademik yang lebih baik. Kaum muda harus memiliki sikap ini sebagai *social skills* yang sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan ataupun membendung arus radikalisme yang

dapat muncul dari sikap merasa benar sendiri, dan mengklaim orang lain salah. Dengan demikian, sikap ini sangat relevan menjadi kutub mainstream di kalangan kaum muda. Bagaimana intellectual humility kaum muda dapat dilihat pada gambar 6. berikut ini:



Gambar 6. Sikap intellectual humility

Terakhir, gambar 6 adalah bentuk sikap moderat dalam berpikir dan berpendapat, yang selaras dan semakna dengan intellectual humanity. Sikap ini menunjukkan presepsi kaum muda muslim yang memiliki tingkat pengetahuan yang terbuka terhadap hal-hal baru, dan berbeda. Untuk mengetahui sikap tersebut kami mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cara berfikir mereka. Dari informan menunjukan kaum muda muslim memiliki beberapa varian sikap terhadap perbedaan pandangan, dilihat dari; informan Indonesia bagian barat motivasi untuk diajari jika tidak memahami (20%), tidak keberatan untuk diajari (20%), menyambut pandangan baru (20%), terbuka untuk merevisi pandangannya (20%), tersinggung saat seseorang tidak sependapat (4%), dan tidak tersinggung dengan orang yang tidak sependapat (16%).

Pada informan Indonesia bagian tengah, keinginan untuk diajari jika tidak memahami (19.15%), keberatan untuk diajari (2,13%), tidak keberatan untuk diajari (19,15%), menyambut pandangan baru (19,15%), terbuka untuk merevisi pandangannya (17,02%), tersinggung saat seseorang tidak sependapat (8,51%), dan tidak tersinggung dengan orang yang tidak sependapat (12,77%). Sedangkan dari informan Indonesia bagian timur, keinginan untuk diajari jika tidak memahami (18.75%), keberatan untuk diajari (0%), tidak keberatan untuk diajari (20,83%), menyambut pandangan baru (20,83%), terbuka untuk merevisi pandangannya (18,75%), tersinggung saat seseorang tidak sependapat (8,51%), dan tidak tersinggung dengan orang yang tidak sependapat (12,77%).

Sikap intellectual humility yang menolak menerima pandangan yang berbeda jika pandangan tersebut disampaikan dengan cara yang baik, begitu juga dengan sikap tersinggung dengan perbedaan pandangan orang lain, hal ini diyakini bahwa apa yang disampaikan perlu memahami kondisi lawan bicara sehingga tidak menyinggung dan menyerah pribadi. Sedangkan

orang yang ingin menerima pandangan dan terbuka diajari jika ia merasa hal tersebut tidak diketahui sama sekali, sikap ini menunjukkan bawa pengetahuan yang ia miliki sudah cukup untuk menjadi standar pengetahuan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan beberapa riset sebelumnya. Laporan Indonesia Millennial Report 2019 menemukan bahwa sebanyak 81.5% kaum muda milenial memberikan dukungan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia [64], walaupun masih ditemukan sebanyak 19,5% mendukung khilafah Islamiyah untuk diterapkan. Demikian juga respon kaum muda terhadap ekstrimisme dan kekerasan berbasis agama menunjukkan tidak setuju sebanyak 94,4%, Demikian juga ketika disodori pertanyaan apakah mereka setuju atau tidak terhadap toleransi, sebanyak 93% responden menyatakan setuju. Artinya, mereka memandang intoleransi sebagai nilai sangat buruk [65].

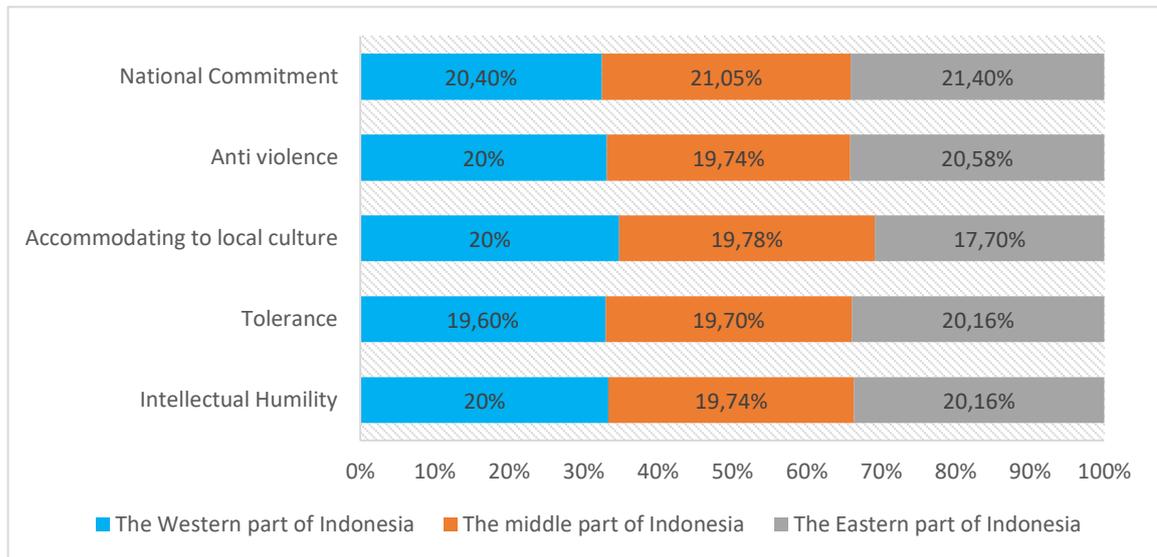
4.1.3. Penyusunan Model Moderasi Beragama

Dari analisis data melalui Nvivo pada gambar 1. Menunjukkan bahwa informan Indonesia bagian barat memiliki sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (20,40%), sikap anti kekerasan, akomodasi terhadap kebudayaan lokal, dan intelektual humility memiliki persentase (20%), sedangkan sikap toleransi (19,60%). Pada informan Indonesia bagian tengah memiliki sikap komitmen kebangsaan (21,05%), sikap anti kekerasan (19,74%), akomodasi terhadap kebudayaan lokal (19,78%), sikap toleransi (19,70%), dan intelektual humanity dengan persentase (19,74%). Sedangkan informan Indonesia bagian timur, memiliki sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (21,40%), sikap anti kekerasan (20,58%), sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal (17,70%), sikap toleransi (21,16%), dan *intellectual humility* 20.16%).

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan beberapa riset sebelumnya. Laporan Indonesia Millennial Report 2019 menemukan bahwa sebanyak 81.5% kaum muda milenial memberikan dukungan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia [64], walaupun masih ditemukan sebanyak 19,5% mendukung khilafah Islamiyah untuk diterapkan. Demikian juga respon kamu muda terhadap ekstrimisme dan kekerasan berbasis agama menunjukkan tidak setuju sebanyak 94,4%, Demikian juga ketika disodori pertanyaan apakah mereka setuju atau tidak terhadap toleransi, sebanyak 93% responden menyatakan setuju. Artinya, mereka memandang intoleransi sebagai nilai sangat buruk [65].

Bertumpu pada temuan penelitian ini, maka penting untuk menyiapkan model pendidikan moderasi beragama pada kaum muda yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai pendekatan, diantaranya adalah dengan memperkuat *intellectual humility* yang akan berdampak terhadap sikap toleransi. Alternatifnya adalah dengan intervensi moderasi beragama kaum muda yang integratif, yaitu dengan menggabungkan program dukungan psikologis dan counter-ideology, peningkatan kemampuan berpikir kritis, terbuka dan reflektif [66], [67], *open-mindedness* sebagai salah satu kemampuan *intellectual humility* [68], dukungan terhadap psikologis melalui penguatan identitas dan konseling [69], serta menekankan pada kompleksitas kognitif [70]. Aspek-aspek inilah yang harus dipertimbangkan untuk menyusun model moderasi beragama pada kaum muda.

Dari hasil coding, maka kemudian diidentifikasi aspek-aspek penting yang bermanfaat untuk membangun kerangka model riset, yakni:



Gambar 7. Ihtisar hasil coding data FGD

Penelitian ini membagi sikap moderasi menjadi lima yaitu; komitmen kebangsaan, sikap anti kekerasan, sikap akomodasi terhadap kebudayaan lokal, sikap toleransi dan sikap intellectual humility kaum muda. Identifikasi jawaban informan terhadap pertanyaan tentang moderasi beragam menunjukkan beberapa karakter jawaban dari masing-masing informan yang mewakili wilayah masing-masing. Informan Indonesia bagian barat menunjukkan bahwa sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (20,40%), sikap anti kekerasan, akomodasi terhadap kebudayaan lokal, dan intelektual humanity memiliki persentase (20%), sedangkan sikap toleransi (19,60%). Indonesia bagian tengah dengan persentase sikap komitmen kebangsaan (21,05%), sikap anti kekerasan (19,74%), akomodasi terhadap kebudayaan lokal (19,78%), sikap toleransi (19,70%), dan intellectual humility dengan persentase (19,74%). Sedangkan Indonesia bagian timur, sikap komitmen kebangsaan dengan persentase (21,40%), sikap anti kekerasan (20,58%), sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal (17,70%), sikap toleransi (21,16%), dan intellectual humanity 20.16%).

Gambar 1, menunjukan sikap masing-masing informan berdasarkan pembagian wilayah. Informan di Indonesia bagian barat memiliki sikap moderasi dengan nilai sama, jika dilihat dari lima parameter dalam penelitian, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai yang stabil dibandingkan dengan Indonesian bagian tengah. Indonesia bagian timur dengan nilai persentase tinggi (21,05%) pada komitmen kebangsaan, empat sikap moderasi lainnya cenderung rendah terutama pada sikap toleransi dengan nilai 19,70%). Indonesia bagian timur memiliki karakter yang cukup berbeda pada sikap moderasi dilihat dari nilai yang cukup variatif dengan nilai paling rendah (17,70%) akomodasi terhadap budaya lokal, sedangkan sikap lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan sikap moderasi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah.

Dari hasil ini, kemudian peneliti melakukan tahapan untuk menyusun model penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan probability variabel. Kontruksi variabel adalah tahap awal dalam menyusun model. Tahap ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan model. Ada dua cara menyusun kontruksi variabel: (1) Confirmatory factor analysis , berdasarkan penelitian sebelumnya dengan mengandalkan research gap; dan (2) Exploration factor analysis, benar-

benar menyusun model baru tanpa replikasi temuan sebelumnya. Pada tahap ini aplikasi yang diperlukan; (1) Nvivo, untuk membuat daftar nominasi variabel. Sumber data umumnya merujuk jurnal terdahulu, konfirmasi para ahli, atau pendapat responden; (2) daftar nominasi yang ditemukan selanjutnya dibuat pengelompokan antara variabel dan indikator yang mungkin. Metode yang digunakan adalah Confirmatory factor analysis digunakan analisis korelasional pearson.

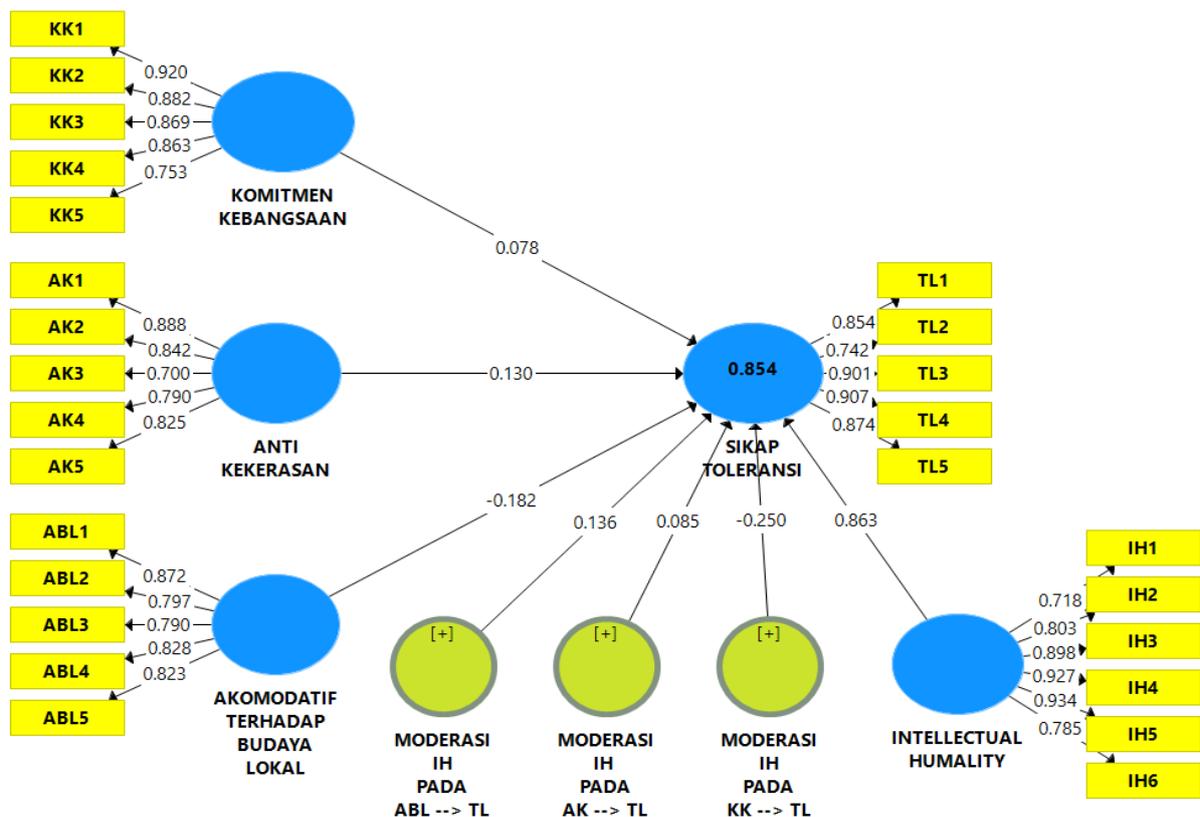
- b. Review variabel. Review konstruksi variabel biasanya meminta pendapat dan saran dari para ahli.
- c. Penyusunan Model. Konstruksi variabel yang sudah disusun berdasar teori atau jurnal sebelumnya diujicobakan terhadap audien, atau responden yang dinilai memahami isu penelitian. Tahap ini membutuhkan proses yang lama dan melelahkan, untuk menemukan model yang dinilai sesuai dengan gagasan awal peneliti. Peneliti memanfaatkan PLS.

Sesuai protokol FGD (asumsi yang dipergunakan *Confirmatory factor analysis*), maka penyusunan model yang dikembangkan dari beberapa riset sebelumnya, model yang rencana dirilis dalam penelitian ini, dengan memperhatikan bahwa kontribusi dan kebaruan penelitian ini adalah memperluas model dengan mempertimbangkan hubungan moderasi beragama dengan toleransi melalui mediasi intellectual humility yang pada riset sebelumnya diletakkan sebagai variabel bebas. Beberapa penelitian terbaru secara spesifik menemukan pengaruh intellectual humility terhadap toleransi beragama. Kerendahan hati dan toleransi adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan [21]. Keterbukaan dan keluwesan dalam berpikir juga memudahkan individu untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, intellectual humility lebih mudah terbentuk dan memperkuat sikap toleransi [22], [23].

Tahap-tahap dalam analisis SEM PLS terdiri dari (1) menggambar diagram jalur sesuai dengan kerangka model penelitian; (2) melakukan uji *outer model* untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur variabelnya (konstruk); (3) menilai *goodness of fit model* untuk memastikan bahwa data yang diolah telah fit dengan model yang diestimasi sehingga sampel yang digunakan dapat memberikan gambaran kondisi populasi yang sebenarnya dan (4) melakukan pengujian *inner model* yang merupakan tahap pengujian pengaruh antar variabel sebagai alat untuk menguji hipotesis penelitian (Ringle, 2015).

Analisis CFA (Pengujian Outer Model)

Analisis CFA dengan program smartpls terdiri dari beberapa tahap yaitu pengujian *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Hasil analisis PLS dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian jika seluruh indikator dalam model PLS telah memenuhi syarat validitas konvergen, validitas deskriminan dan reliabilitas komposit. Untuk memunculkan hasil uji outer model, model PLS harus diestimasi dengan teknik *algorithm*. Hasil estimasi model PLS dengan teknik *algorithm* dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.5 Hasil Estimasi Model PLS Algorithm

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor masing-masing indikator terhadap konstraknya. Untuk penelitian konfirmatori, batas *loading factor* yang digunakan adalah sebesar 0,7, sedangkan untuk penelitian eksploratori maka batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,6 dan untuk penelitian pengembangan, batas loading factor yang digunakan adalah 0,5. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian konfirmatori, maka batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,7. Berikut ini adalah nilai loading factor seluruh indikator dalam model penelitian berdasarkan hasil estimasi model PLS dengan teknik *algorithm* :

Tabel 4.1 Nilai Loading Factor pada Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	Cut Value	Validitas Konvergen
Komitmen Kebangsaan	KK1	0.920	0.7	valid
	KK2	0.882	0.7	valid
	KK3	0.869	0.7	valid
	KK4	0.863	0.7	valid
	KK5	0.753	0.7	valid
Akomodatif Terhadap Budaya Lokal	ABL1	0.872	0.7	valid
	ABL2	0.797	0.7	valid
	ABL3	0.790	0.7	valid
	ABL4	0.828	0.7	valid
	ABL5	0.823	0.7	valid
Anti Kekerasan	AK1	0.888	0.7	valid
	AK2	0.842	0.7	valid
	AK3	0.700	0.7	valid
	AK4	0.790	0.7	valid

Variabel	Indikator	Loading Factor	Cut Value	Validitas Konvergen
Intellectual Humality	AK5	0.825	0.7	valid
	IH1	0.718	0.7	valid
	IH2	0.803	0.7	valid
	IH3	0.898	0.7	valid
	IH4	0.927	0.7	valid
	IH5	0.934	0.7	valid
Sikap Toleransi	IH6	0.785	0.7	valid
	TL1	0.854	0.7	valid
	TL2	0.742	0.7	valid
	TL3	0.901	0.7	valid
	TL4	0.907	0.7	valid
	TL5	0.874	0.7	valid

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa seluruh indikator telah memiliki nilai *loading factor* > 0,7 yang berarti bahwa seluruh indikator dapat digunakan untuk mengukur konstruksya, tidak ada indikator yang harus dikeluarkan karena seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas yang dipersyaratkan.

Selain dengan melihat nilai *loading factor* masing-masing indikator, validitas konvergen juga harus dinilai dari nilai AVE masing-masing konstruk, seluruh konstruk dalam model PLS dinyatakan telah memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE masing-masing konstruk > 0,5. Nilai AVE masing-masing konstruk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Nilai AVE Konstruk

Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)
ABL	0,676
AK	0,659
IH	0,719
KK	0,739
MOD_ABL	1,000
MOD_AK	1,000
MOD_KK	1,000
TL	0,736

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis PLS pada tabel 4.9 di atas, setelah seluruh indikator tidak valid dikeluarkan dari model, seluruh indikator telah valid dalam mengukur konstruksya, selanjutnya dinilai dari nilai AVE, seluruh konstruk juga telah memiliki nilai AVE yang melebihi 0,5 yang berarti bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang disyaratkan. Tahap analisis dilanjutkan pada tahap uji validitas deskriminan.

Validitas Deskriminan

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika nilai kuadrat AVE masing-masing konstruk eksogen melebihi korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.3 Validitas Deskriminan menurut Uji *Fornell Larcker*

	ABL	AK	IH	KK	MOD_ABL	MOD_AK	MOD_KK	\sqrt{AVE}
ABL	0.822							0.822
AK	0.882	0.812						0.812
IH	0.931	0.904	0.848					0.848
KK	0.879	0.888	0.882	0.859				0.859
MOD_ABL	-0.794	-0.812	-0.735	-0.781	1.000			1.000
MOD_AK	-0.801	-0.814	-0.725	-0.798	0.984	1.000		1.000
MOD_KK	-0.786	-0.813	-0.725	-0.781	0.986	0.989	1.000	1.000
TL	0.842	0.862	0.915	0.834	-0.706	-0.701	-0.709	0.858

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai akar kuadrat AVE seluruh konstruk selalu melebihi koefisien korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model PLS ini telah memenuhi validitas deskriminan yang dipersyaratkan.

Selain dengan menggunakan metode *Fornell Larcker*, validitas deskriminan juga dapat dilihat dari nilai *cross loading* masing-masing indikator terhadap konstraknya, indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas deskriminan jika *cross loading* indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *cross loading* indikator terhadap konstruk lainnya.

Tabel 4.4 Validitas Deskriminan menurut nilai *Cross Loading*

	ABL	AK	IH	KK	TL
ABL1	0,872	0,871	0,852	0,803	0,719
ABL2	0,797	0,650	0,652	0,607	0,584
ABL3	0,790	0,650	0,712	0,647	0,663
ABL4	0,828	0,718	0,781	0,847	0,694
ABL5	0,823	0,722	0,808	0,693	0,777
AK1	0,794	0,888	0,777	0,831	0,722
AK2	0,698	0,842	0,703	0,716	0,674
AK3	0,524	0,700	0,539	0,605	0,538
AK4	0,616	0,790	0,702	0,620	0,682
AK5	0,881	0,825	0,887	0,798	0,834
IH1	0,616	0,702	0,718	0,646	0,725
IH2	0,678	0,622	0,803	0,674	0,684
IH3	0,861	0,802	0,898	0,764	0,871
IH4	0,911	0,897	0,927	0,878	0,808
IH5	0,917	0,878	0,934	0,859	0,826
IH6	0,714	0,663	0,785	0,641	0,719
KK1	0,898	0,887	0,900	0,920	0,812
KK2	0,719	0,743	0,723	0,882	0,700
KK3	0,760	0,788	0,748	0,869	0,790
KK4	0,769	0,739	0,756	0,863	0,709
KK5	0,590	0,624	0,637	0,753	0,523
TL1	0,725	0,773	0,784	0,717	0,854
TL2	0,588	0,718	0,652	0,666	0,742
TL3	0,717	0,715	0,805	0,710	0,901
TL4	0,778	0,779	0,821	0,813	0,907
TL5	0,785	0,718	0,849	0,668	0,874

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator memiliki indikator tertinggi pada konstraknya bukan pada konstruk lain sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator telah memenuhi persyaratan validitas deskriminan, sebagai contoh indikator TL5 memiliki *cross loading* 0,874 terhadap konstraknya (TL), sedangkan terhadap konstruk lainnya *cross loading* TL5 lebih rendah dari 0,874 yaitu sebesar 0,785 terhadap konstruk ABL, sebesar 0,718 terhadap AK, sebesar 0,849 terhadap IH dan sebesar 0,668 terhadap KK sehingga dapat dinyatakan bahwa validitas deskriminan konstruk TL5 terpenuhi.

Berdasarkan hasil kedua pengujian validitas deskriminan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *outer model* PLS telah memenuhi kriteria validitas deskriminan yang dipersyaratkan. Pengujian dilanjutkan pada uji reliabilitas komposit.

Reliabilitas Komposit

Reliabilitas konstruk dapat dinilai dari nilai *cronbachs Alpha* dan nilai *Composite Reliability* dari masing-masing konstruk. Nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* yang disarankan adalah lebih dari 0,7, namun pada penelitian pengembangan, oleh karena batas *loading factor* yang digunakan rendah (0,5) maka nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* rendah masih dapat diterima selama persyaratan validitas konvergen dan validitas deskriminan telah terpenuhi.

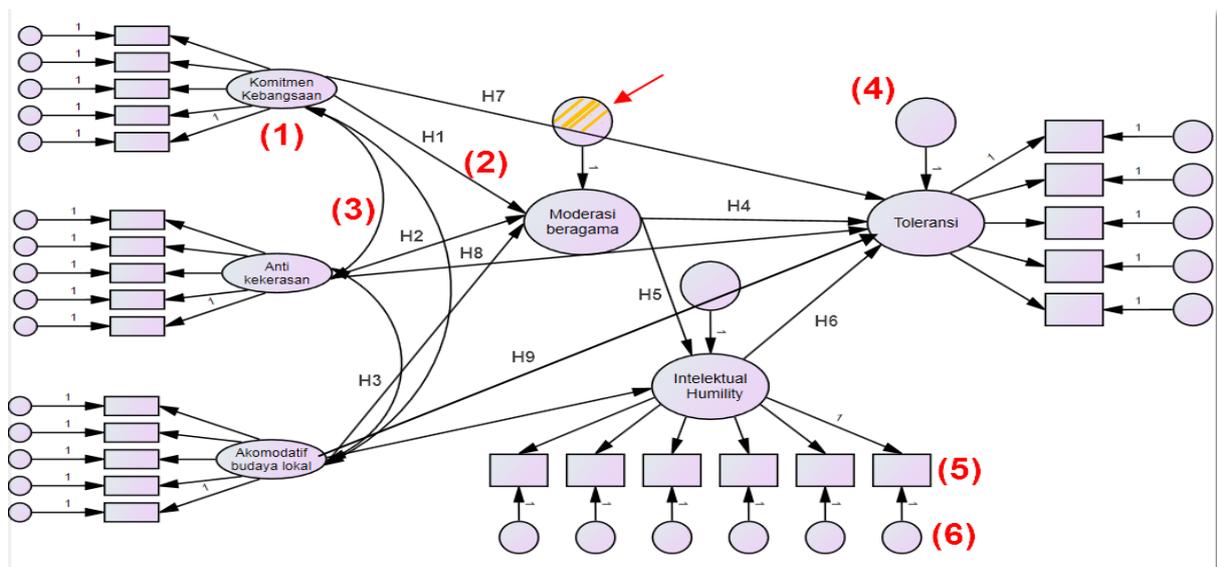
Tabel 4.5 Reliabilitas Komposit

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
ABL	0,880	0,913
AK	0,869	0,906
IH	0,920	0,938
KK	0,911	0,934
MOD_ABL	1,000	1,000
MOD_AK	1,000	1,000
MOD_KK	1,000	1,000
TL	0,909	0,933

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.12 di atas, nilai *composite reliability* seluruh konstruk juga telah melebihi 0,7 hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi reliabilitas yang dipersyaratkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk reliabel, sementara berdasarkan nilai *cronbachs alpha* Kinerja masih di bawah 0,7, hal ini dapat diabaikan dan konstruk kinerja tetap dapat dianggap reliabel karena pengukuran reliabilitas dengan menggunakan nilai *composite reliability* dinilai lebih baik dari pengukuran reliabilitas dengan *cronbachs alpha*.

Model yang (mungkin) dikembangkan adalah:



Gambar 8. Proyeksi Model teoritis penelitian

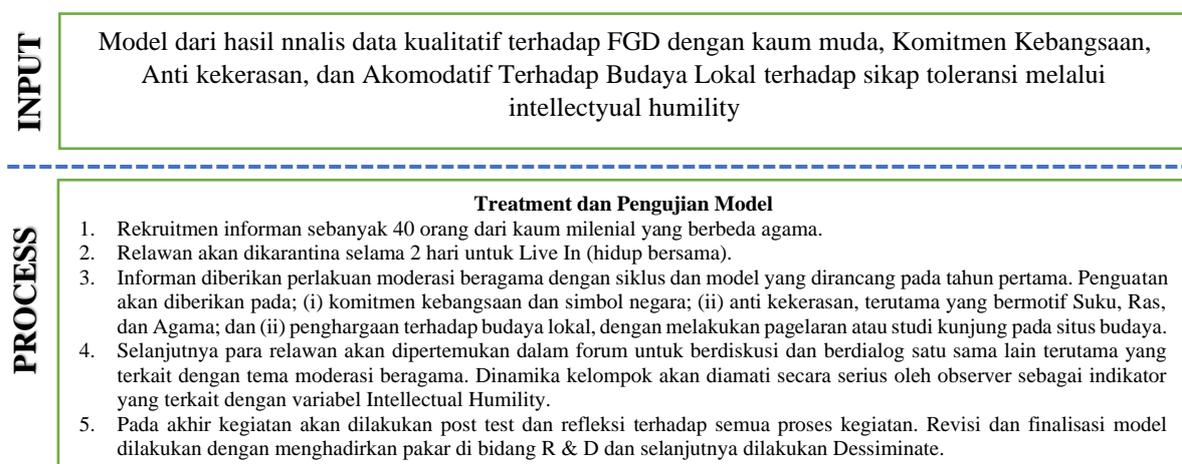
Keterangan:

- (1) Lingkaran dengan label merupakan simbol variabel endogen
- (2) Arah panah menunjukkan *effect* (atau hanya sekedar correlational). Keputusannya setelah dilakukan penyebaran kuesioner, atau bertanya kepada ahli.
- (3) Multikolinearitas, hubungan antar indikator. Pembuktiannya dengan nilai loading factor. Keputusan ini biasanya membutuhkan waktu lama, karena sangat tergantung pada nilai varians extract hasil uji kuesioner pilot test. Sangat mungkin sebuah indikator (yang tercantum dalam proposal) dihapus atau berdasarkan analisis Rotasi Faktor dengan data dari Nvivo malah memunculkan indikator baru.
- (4) Residual variabel. Sepengalaman saya tahap ini agak melelahkan karena sering terjadi jawaban kuesioner jauh dari ide peneliti sewaktu menyusun proposal. Terutama pada residual moderasi beragama (lihat tanda panah merah), dari ideo pokok pada file FGD sama sekali saya belum mempunyai gambaran mau seperti apa model yang akan diusung. Jika nanti stagnan, sebaiknya berkonsultasi ke ahli.
- (5) Tanda kotak menunjukkan jumlah kuesioner untuk masing-masing variabel.
- (6) Nilai yang menunjukkan sejauh mana kesalahan persepsi responden terhadap maksud dari sebuah pertanyaan. Sebagai contoh (pertanyaan 1 indikator Komitmen kebangsaan): Pancasila adalah ideologi negara yang harus diterima oleh semua pemeluk agama di Indonesia. Kemungkinan akan diperoleh nilai disturbance terhadap pertanyaan ini di atas 5% (berarti pertanyaan harus gugur). Dugaannya adalah perbedaan persepsi di antrara responden memaknai “diterima oleh semua pemeluk agama”, disturbance bisa saja pada kelompok yang kritis akan berpikir “bagaimana dengan penganut kepercayaan?”.

4.1.4. Rencana Penelitian Selanjutnya (Tahun II)

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun dengan tahapan yang sistematis. Pada tahun kedua (2023) peneliti akan menguji model dengan memberikan perlakuan terhadap informan. Informan akan dikelompokkan menjadi 2, yakni satu kelompok 40 orang yang diberikan perlakuan, dan 40 orang sebagai kontrol dan tidak diberikan perlakuan. Berikut ini rencana penelitian di tahun kedua:

Gambar 5. Rencana Penelitian Tahap Kedua



BAB V. STATUS LUARAN

5.1. Luaran Wajib

Luaran wajib yang dijanjikan adalah artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus atau lembaga pengindeks bereputasi lainnya. Saat ini masih dalam proses finishing naskah artikel karena waktu yang sangat singkat. Tetapi peneliti akan memenuhi janji luaran tersebut dapat terealisasi. Pada tahun pertama (2022) status luaran sebagai berikut:

- a. Artikel dengan judul: **Reinforcement Religious Moderation Education for Youth in Strengthening Tolerance: Is Intellectual Humility Needed?** Telah Submitted pada Jurnal: *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, Publisher: AOSIS (Pty) Ltd, ISSN: 02599422, 20728050. Lembaga Pengindeks: Scopus, Clarivate Analytics Web of Science Core Collection, Arts & Humanities Citation Index, AHCI (previously known as ISI), Quartil: Q1.
- b. Artikel dengan Judul: Pengembangan Model Pendidikan Moderasi Beragama pada Kaum Muda di Lembaga Pendidikan Islam (Penyusunan artikel).

5.2. Luaran Tambahan

Luaran tambahan yang dijanjikan adalah Hak Cipta Poster Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hak Cipta dengan judul: Model Moderasi Beragama Kaum Muda Muslim Milenial dalam Penguatan Sikap Toleransi

Melalui Intellectual Humility, telah mendapatkan Sertifikat Hak Cipta (Granted) dari Kemenkumham dengan Nomor: 000381860.

BAB VI. PERAN MITRA

5.1. Kontribusi Mitra

Penelitian pada skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) tidak mensyaratkan mitra. Tetapi untuk memperlancar penelitian ini, peneliti bermitra dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Palopo. Kontribusinya secara lokal di Palopo membantu mempersiapkan informan yang terlibat dalam FGD penelitian ini. Kontribusinya mempersiapkan tempat di kantor Lazismu Palopo yang ditempati kegiatan FGD tersebut.

5.2. Peran Mitra

Mitra berperan sebagai kolaborator yang mempersiapkan generasi muda milenial mengikuti kegiatan FGD di Palopo. Walaupun ini terkesan kecil, tetapi dapat ditingkatkan kerjasamanya di masa yang akan datang. Salah satu pilar LAZISMUH adalah pendidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan juga berpotensi memberikan *incash* untuk kegiatan penelitian lainnya.

BAB VII. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

7.1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang dialami peneliti selama proses penelitian adalah pada saat pengambilan data, sebagian informan masih menjalani pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Ini terjadi khususnya untuk informan yang berada di pulau Jawa, sehingga memerlukan upaya yang ekstra untuk bertemu informan secara langsung. Dengan kerjasama melalui sejawat maka hambatan tersebut dapat dilewati dengan baik, sehingga proses FGD lancar dengan animo yang sangat baik. Selain itu, perpindahan catatan harian dan pelaporan dari Simlitabmas ke BIMA juga belum didukung oleh kesiapan aplikasi tersebut, sehingga masih trial and eror.

7.2. Hambatan Prosedural

Hambatan prosedural yang ditemui adalah singkatnya waktu yang diberikan oleh Kemristekdikbud untuk kegiatan penelitian, rata-rata di bulan Juni-Desember. Ini cukup menyulitkan untuk penelitian multiyears (PDUPT) yang target luarannya adalah Jurnal Internasional Bereputasi. Dengan ini menjadi catatan dan saran untuk kementerian agar mempertimbangkan waktu tersebut dalam linimasa kegiatan penelitian agar dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Syarif, "Religion in the Conflict Flows," *ADDIN*, vol. 13, no. 2, pp. 337–368, 2019.
- [2] A. Yazdani, "The culture of peace and religious tolerance from an Islamic perspective," *Veritas*, no. 47, pp. 151–168, 2020.
- [3] B. Rogers, "Rejecting Religious Intolerance in South-East Asia," *JSEAHR*, vol. 2, p. 208, 2018.
- [4] I. Frydenlund, *The rise of Buddhist-Muslim conflict in Asia and possibilities for transformation*. Norwegian Peacebuilding Research Centre (NOREF), 2015.
- [5] A. Singh, "Conflict between Freedom of Expression and Religion in India—A Case Study," *Soc. Sci.*, vol. 7, no. 7, p. 108, 2018.
- [6] S. Silvestri and J. Mayall, "The role of religion in conflict and peacebuilding," 2015.
- [7] H. Pajarianto, I. Pribadi, P. Sari, and E. L. Education, "Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation," pp. 1–8, 2022.
- [8] H. Pajarianto, "Interreligious relation: Position of women in strengthening Christian and Muslim bonds," *HTS Teol. Stud. Stud.*, vol. 78, no. 4, p. 7, 2022.
- [9] P. Purwati, D. Darisman, and A. Faiz, "Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 3, pp. 3729–3735, 2022.
- [10] F. Zakaria, "Review of Nur Amali Ibrahim, *Improvisational Islam: Indonesian Youth in a Time of Possibility.*," *Contemp. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 95–98, 2020, doi: 10.1007/s11562-019-00440-z.
- [11] I. Subchi, Z. Zulkifli, R. Latifa, and S. Sa'diyah, "Religious Moderation in Indonesian Muslims," *Religions*, vol. 13, no. 5, p. 451, 2022, doi: 10.3390/rel13050451.
- [12] D. Dawing, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural," *Rausyan Fikr J. Stud. Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, vol. 13, no. 2, pp. 225–255, 2017.
- [13] M. Fahri and A. Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Intizar*, vol. 25, no. 2, pp. 95–100, 2019.
- [14] D. K. Foot and D. Stoffman, *Boom, bust & echo: How to profit from the coming demographic shift*. Macfarlane Walter & Ross Toronto, 1996.
- [15] C. Gilleard, "Cohorts and generations in the study of social change," *Soc. Theory Heal.*, vol. 2, no. 1, pp. 106–119, 2004.
- [16] K. Mannheim, "Sociology of knowledge," *Tavistock Publ. Ltd.*, 1984.
- [17] N. Ali, "Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era," *INFERENSI J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 14, no. 1, pp. 1–24, 2020.
- [18] S. H. A. Dodego and D. Witro, "The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia," *Dialog*, vol. 43, no. 2, pp. 199–208, 2020.
- [19] A. Markus, "Multiculturalism Discussion Paper Young adults and cultural diversity: Experiences and challenges Discussion Paper," no. September, 2017.
- [20] C. C. Wolhuter, F. J. Potgieter, and J. L. Van der Walt, "Modelle van interreligieuze

- toleransie in die onderwys van die een-en-twintigste eeu,” *die Skriflig/In Luce Verbi*, vol. 48, no. 1, pp. 1–8, 2014, doi: 10.4102/ids.v48i1.1798.
- [21] E. J. Krumrei-Mancuso and S. V. Rouse, “The development and validation of the comprehensive intellectual humility scale,” *J. Pers. Assess.*, vol. 98, no. 2, pp. 209–221, 2016.
- [22] M. R. Leary *et al.*, “Cognitive and interpersonal features of intellectual humility,” *Personal. Soc. Psychol. Bull.*, vol. 43, no. 6, pp. 793–813, 2017.
- [23] I. Church and P. Samuelson, *Intellectual humility: An introduction to the philosophy and science*. Bloomsbury Publishing, 2016.
- [24] A. Arifinsyah, S. Andy, and A. Damanik, “The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia,” *ESENSIA J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 21, no. 1, pp. 91–108, 2020.
- [25] A. Muhajir, “Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis,” *Situbondo: Tanwirul Afkar*, 2018.
- [26] M. Q. Shihab, “Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama,” *Tangerang Lentera Hati*, 2019.
- [27] W. Hernawan, I. Riyani, B. Busro, I. State, and D. Bandung, “Religious moderation in Naskah Wawacan Babad Walangsungsang : A Sundanese religious diversity wisdom,” *HTS Teol. Stud. Stud.*, vol. 77, pp. 1–13, 2021.
- [28] N. Faiqah and T. Pransiska, “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai,” *Al-Fikra J. Ilm. Keislam.*, vol. 17, no. 1, pp. 33–60, 2018.
- [29] M. A. Ansori, “The Radical Islamic Movement in Indonesia: Roots and Factors,” *KALAM*, vol. 13, no. 2, pp. 2017–2236, 2019.
- [30] Z. Misrawi, “Laporan Akhir Tahun Toleransi dan Intoleransi, Ketika Negara Membiarkan Aksi Intoleransi (Year-End Report on Tolerance and Intolerance, Intolerance Actions When Leaving Country).” Jakarta: Moderate Muslim Society, 2010.
- [31] Y. Z. Wahid *et al.*, “Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) 2015,” The WAHID Institute, 2015.
- [32] K. Dadang, “Sosiologi Agama,” *Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2000.
- [33] A. J. Pesurnay, “Local wisdom in a new paradigm: Applying system theory to the study of local culture in Indonesia,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2018, vol. 175, no. 1, p. 12037.
- [34] T. D. Effendi, “Local Wisdom in Tolerance Building between Ethnic Chinese and Other Ethnicities in Indonesia,” *Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res.*, vol. 276, pp. 203–206, 2019.
- [35] A. Sedayu, A. G. Gautama, S. Rahmah, and A. R. Setiono, “Religious tolerance, cultural, local wisdom and reliability in the Great Mosque building of Mataram Kotagede Yogyakarta,” *J. Cult. Herit. Manag. Sustain. Dev.*, 2021.
- [36] E. Farrag, “Architecture of mosques and Islamic centers in Non-Muslim context,” *Alexandria Eng. J.*, vol. 56, no. 4, pp. 613–620, 2017.
- [37] H. Subhi Azhari, *Indeks Kota Toleran 2020*. 2020.
- [38] W. Bąk, B. Wójtowicz, and J. Kutnik, “Intellectual humility: an old problem in a new

- psychological perspective,” *Curr. Issues Personal. Psychol.*, vol. 10, no. 2, pp. 85–97, 2022, doi: 10.5114/cipp.2021.106999.
- [39] L. Zmigrod, S. Zmigrod, P. J. Rentfrow, and T. W. Robbins, “The psychological roots of intellectual humility: The role of intelligence and cognitive flexibility,” *Pers. Individ. Dif.*, vol. 141, pp. 200–208, 2019.
- [40] J. N. Hook, J. E. Farrell, K. A. Johnson, D. R. Van Tongeren, D. E. Davis, and J. D. Aten, “Intellectual humility and religious tolerance,” *J. Posit. Psychol.*, vol. 12, no. 1, pp. 29–35, 2017.
- [41] Sugiyono, “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013.
- [42] S. Thiagarajan, D. S. Semmel, and M. I. Semmel, “Instructional development for training teachers of exceptional children.” Minneapolis, Minnesota: leadership training institute/special education ..., 1974.
- [43] Y. S. Lincoln and E. G. Guba, *Naturalistic inquiry*. sage, 1985.
- [44] L. J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi,” 2007.
- [45] J. P. Spradley, *Participant observation*. Waveland Press, 2016.
- [46] S. Arikunto, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,” 2013.
- [47] M. D. C. Tongco, “Purposive sampling as a tool for informant selection,” *Ethnobot. Res. Appl.*, vol. 5, pp. 147–158, 2007, doi: 10.17348/era.5.0.147-158.
- [48] R. DeVellis, “Scale development: Theory and applications. 4th.” Los Angeles, CA: Sage, 2017.
- [49] H. Latan, C. Jose, C. Jabbour, A. Beatriz, and L. De Sousa, “Social Media as a Form of Virtual Whistleblowing : Empirical Evidence for Elements of the Diamond Model,” *J. Bus. Ethics*, no. 0123456789, 2020, doi: 10.1007/s10551-020-04598-y.
- [50] L. H. Saifuddin, “Moderasi Beragama,” *Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementerian. Agama RI*, 2019.
- [51] M. Batool and B. Akram, “Development and Validation of Religious Tolerance Scale for Youth,” *J. Relig. Health*, vol. 59, no. 3, pp. 1481–1493, 2020, doi: 10.1007/s10943-019-00897-5.
- [52] M. Alfano *et al.*, “Development and validation of a multi-dimensional measure of intellectual humility,” *PLoS One*, vol. 12, no. 8, 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0182950.
- [53] U. Sekaran and R. Bougie, *Research methods for business: A skill building approach*. john wiley & sons, 2019.
- [54] R. F. Speklé and S. K. Widener, “Challenging issues in survey research: Discussion and suggestions,” *J. Manag. Account. Res.*, vol. 30, no. 2, pp. 3–21, 2018.
- [55] K. Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo, 3rd Edition*. 2021.
- [56] R. D. G. Allen, Katherine, .Liciane Alves, Mary M, Daniel Castellanos, Andrea Doucet, Laura Golojuch, *How Qualitative Data Analysis Happens*. New York, NY, 2019.
- [57] A. Edwards-Jones, “Qualitative data analysis with NVIVO,” *J. Educ. Teach.*, vol. 40, no. 2, pp. 193–195, 2014, doi: 10.1080/02607476.2013.866724.
- [58] C. Brandão, “Qualitative Data Analysis with NVivo,” *Qual. Res.*, vol. 12, no. 4, pp. 492–

494, 2015, doi: 10.1080/14780887.2014.992750.

- [59] K. E. Göransson, A. Ehrenberg, M. Ehnfors, and M. Fonteyn, “An effort to use qualitative data analysis software for analysing think aloud data,” *Int. J. Med. Inform.*, vol. 76, no. SUPPL. 2, pp. 270–273, 2007, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2007.05.004.
- [60] N. H. Woolf and C. Silver, “Qualitative Analysis Using Nvivo, The Five Level QDA Method,” in *Routledge*, New York and London: Routledge, 2018, pp. 1–1235.
- [61] A. W. Kruglanski and E. Orehek, “The need for certainty as a psychological nexus for individuals and society,” *Extrem. Psychol. Uncertain.*, pp. 3–18, 2012.
- [62] H. Pajarianto, I. Pribadi, and P. Sari, “Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation,” *HTS Teol. Stud. Stud.*, vol. 78, no. 4, p. 8, 2022.
- [63] V.-M. Kärkkäinen, “Miroslav Volf, Flourishing: Why We Need Religion in a Globalized World (New Haven: Yale University Press, 2015), pp. xviii+ 280.£ 18.99/\$28.00.,” *Scottish J. Theol.*, vol. 70, no. 4, pp. 477–479, 2017.
- [64] IDN Research Institute, “Indonesia Millennial Report 2019 Table of Content,” pp. 1–10, 2019.
- [65] S. Pandey, “Executive Summary Survei Persepsi dan Sikap Generasi Muda Terhadap Intoleransi dan Ekstremisme 2020,” *South African Med. J.*, vol. 101, no. 2003, p. 16, 2020.
- [66] M. N. Milla and A. N. Umam, “Understanding intergroup contact on terrorist prisoners in Indonesia,” in *Learning from violent extremist attacks: Behavioural sciences insights for practitioners and policymakers*, 2019, pp. 259–278.
- [67] M. N. Milla, I. E. Putra, and A. N. Umam, “Stories from jihadists: Significance, identity, and radicalization through the call for jihad,” *Peace Confl. J. Peace Psychol.*, vol. 25, no. 2, p. 111, 2019.
- [68] A. Kruglanski, K. Jasko, D. Webber, M. Chernikova, and E. Molinaro, “The making of violent extremists,” *Rev. Gen. Psychol.*, vol. 22, no. 1, pp. 107–120, 2018.
- [69] D. Bouzar and M. Martin, “Méthode expérimentale de déradicalisation: quelles stratégies émotionnelles et cognitives?,” *Pouvoirs*, no. 3, pp. 83–96, 2016.
- [70] I. E. Putra, F. Erikha, R. S. Arimbi, and A. Rufaedah, “Increasing integrative complexity on convicted terrorists in Indonesia,” *Soc. Psychol. Soc.*, vol. 9, no. 2, pp. 35–45, 2018.
- [71] I. M. Church and P. L. Samuelson, *Intellectual humility: An introduction to the philosophy and science*. Bloomsbury Publishing, 2017.

Youth religious moderation model and tolerance strengthening through intellectual humility



Authors:

Hadi Pajarianto¹ 
 Imam Pribadi¹ 
 Nur S. Galugu¹ 

Affiliations:

¹Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Palopo, Palopo, Indonesia

Corresponding author:

Hadi Pajarianto,
 hadipajarianto@umpalopo.ac.id

Dates:

Received: 08 Oct. 2022
 Accepted: 11 Nov. 2022
 Published: 15 Feb. 2023

How to cite this article:

Pajarianto, H., Pribadi, I. & Galugu, N.S., 2023, 'Youth religious moderation model and tolerance strengthening through intellectual humility', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79(1), a8196. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>

Copyright:

© 2023. The Authors.
 Licensee: AOSIS. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

Read online:



Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

Religious moderation is a crucial issue, along with religious and cultural values that develop in society. Religious moderation's success will significantly determine millennial Muslim youth's tolerant attitudes, mediated by intellectual humility. This study aimed to identify and design a model of religious moderation on tolerance by mediating intellectual humility. The research used mixed methods; data analysis used NVivo 12 Plus (software by QSR International), to compile variable nominations; and Partial Least Squares - Structural Equation (PLS-SEM) creates research models. There were 350 Indonesian youth informants in the study, which used interviews and focus group discussions. The results showed that religious moderation in youth, including national commitment, antiviolence and acceptance of local culture, can strengthen tolerance, mediated by intellectual humility. The tolerant attitude shows high and stable data and confirms the strengthening of religious moderation in young people. From the identification, a model of religious moderation in youth was designed and revised, and the results have met all the requirements for modelling so that it can be continued for testing.

Contribution: This research provides essential assistance in implementing religious moderation for young people, which is currently the most prevalent issue in Indonesia. The world needs a moderate religious attitude to become a middle ground for various religious and cultural differences among people globally.

Keywords: Youth; religious; moderation; tolerance; intellectual humility.

Introduction

In various parts of the world, the threat of conflict triggered by differences in ethnicity, ethnicity, race, political affiliation and religious sentiments is still prone to occur, leading to the dominance of the majority over minorities (Rogers 2018; Syarif 2019; Yazdani 2020). Extreme religious attitudes and self-righteousness also cause this condition. Some countries have problems with inter-religious relations; for example, the feud between Muslims and Buddhists has occurred in Sri Lanka and Myanmar. Conflicts between Hindu and Muslim groups in India arose as a result of mutual contempt between religious communities (Frydenlund 2015; Singh 2018). This situation forces humanity into a situation of conflict and even war, which is exhausting. Several studies have found the role of faith-based organisations and religious leaders in promoting peaceful conflict resolution through mediation. Mediation can be done by increasing the meeting point between religious and cultural values. This process is called moderation, choosing a middle way between conflict resolution and peace and strengthening religious relations (Pajarianto 2022; Pajarianto, Pribadi & Sari 2022).

Demographically, Indonesia can potentially see conflict between one religion and the adherents of another because several religions live in this country. Islam is the majority religion, as Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, Confucianism and other beliefs have lived for centuries in the archipelago, not to mention hundreds of tribes with different languages. Indonesia learns from conflicts that take advantage of religious sentiments, such as in Poso, Maluku, Kalimantan and other areas (Hasudungan 2021; Khairil 2017; Zulkifli et al. 2019). Nowadays, tolerance is encouraged by the government and civil society. A survey from Politica Research and Consulting (PRC), conducted by the Indonesian Political Parameter (PPI) in 2022, showed that there is an increase in the value of the situation of ethnic tolerance in Indonesia based on the assessment of these figures, which is 7.32, or in the excellent category. Likewise, the situation of religious tolerance has a value of 6.85. Then the security situation gets a score of 6.83, and the situation of the civil role scores 6.57, the situation of human rights

enforcement scores 6.05 and the economic situation has a value of 6.01 (Purwati, Darisman & Faiz 2022).

Indonesia can be a model for managing potential religious and ethnic conflicts with tolerant religious understanding, attitudes and behaviour so that moderation becomes a unique feature and process (Zakaria 2020). Studies in Pakistan are currently struggling to transform religious moderation in educational curricula to support peace, because education can exacerbate or improve conflict (Kalhoro & Cromwell 2022). In addition, studies in Papua, Indonesia, show that moderation of religious understanding with local wisdom can reduce potential conflict (Rusyaid, Hermanto & Nasir 2022). As a result, religious moderation has become a national policy as a solution to prevent intolerance and radicalism (Subchi et al. 2022). Moderation is the essence of Islam, which is very relevant in the context of diversity in all aspects, religion, customs, ethnicity and the nation itself (Dawing 2017). Religious moderation has at least three dimensions: (1) national commitment, (2) nonviolence and (3) accommodation to local culture. These three indicators can be used to identify how strongly the religious moderation practised by millennials in Indonesia is and how much vulnerability they have (Fahri & Zainuri 2019).

Millennials are defined as those born between 1980 and 1995 (Foot & Stoffman 1996). David Foot is a demographer who based his opinion on them as the 'Baby Boom Echo'. Millennials are said to have a common location in historical time, shaped by historical events and experiences at that time (Gilleard 2004). This conceptualisation of 'generation' is rooted in Mannheim's theory or the sociology of generation, in which members of the same generation share more than the same year of birth. As a result, the environment in which millennials grew up during their formative years influences their values, attitudes and behaviour (Mannheim 1984).

Several researchers have explored the issue of religious moderation, but in general, it is still in the literature review and published in national journals. Firstly, it was conducted by Nuraliah Ali to measure religious moderation descriptively with limited indicators. More indicators can be formulated to determine a person's perspective, attitudes and religious methods (Ali 2020) or to consider other variables as mediation. Secondly, according to Dodego, religious moderation is needed by the Indonesian people because it is simple, it is not rigid and it promotes harmony (Dodego & Witro 2020). Thirdly, the study in Australia by Markus also describes the potential discrimination of millennial youth, but they make good use of opportunities and cultural diversity to understand differences (Markus 2017). Fourthly, Subchi found that religiosity influences religious moderation, which is different from other findings about the adverse effects of religiosity, especially the ritual dimension, on religious tolerance, internally and externally (Subchi et al. 2022). Fifthly, Wolhuter suggests developing a co-existence model of worldviews and life (Wolhuter, Potgieter & Van der Walt 2014). This model evaluates inclusivism, universalism and pluralism, which have shortcomings.

Religious moderation is an essential issue in Indonesia's National Medium-Term Development Plan. It is one of the crucial agendas in countering various acts of intolerance that can occur in the largest multicultural country in the world, like Indonesia. From previous research (research gap) and the development of religious moderation discourse, researchers developed a novelty by including intellectual humility to be considered as a mediation of religious moderation with tolerance. Several recent studies have more specifically found the effect of intellectual humility on religious tolerance. Humility and tolerance are different but related concepts (Krumrei-Mancuso & Rouse 2016). Openness and flexibility in thinking also make it easier for individuals to see from the perspective of others; thus, intellectual humility is more easily formed and strengthens tolerance (Church & Samuelson 2016; Leary et al. 2017). This study aims to identify indicators of the religious moderation model to strengthen tolerance attitudes with intellectual humility mediation and to design a religious moderation model to strengthen tolerance attitudes with intellectual humility mediation.

Methods

In general, this research will carry out the process of identifying and designing the model (Thiagarajan, Semmel & Semmel 1974). This study is qualitative-quantitative descriptive research, taking an educational and religious approach by collecting various themes, cultural focuses, values and symbols in each domain (Spradley 2016). The research model is an unbalanced mixed combination model or concurrent embedded. The concurrent embedded method is a research method that combines qualitative and quantitative research methods by mixing both methods in an unbalanced but independent manner to answer similar problem formulations (Sugiyono 2017).

The data source in this study is the subject from which the data can be obtained (Arikunto 2013; Moleong 2007). Informants were identified using snowball sampling, and as many as 350 people were selected proportionally. In detail, there were 100 students from the western part of Indonesia, 150 students from the centre and 100 from the eastern part. Focus group discussions (FGD) and interviews were used to collect data. The FGD process is carried out in stages: (1) preparation by arranging seating, equipment, notes and group dynamics; (2) facilitation during the meeting, starting with random self-introduction, approval, confidentiality and rules; (3) the discussion process, by recording and observing the discussion, investigating, pondering and observing nonverbal cues; and (4) closing, thanking the FGD participants and resource persons.

Data analysis was carried out using qualitative software, in this case, NVivo 12 Plus, as a computer platform programme developed by QSR International to process data through highlighting, writing notes and linking ideas (Brandão 2015; Edwards-Jones 2014; Göransson et al. 2007; Humble & Radina 2019; Jackson 2021). The stages of data analysis consist of: (1) collecting data, (2) organising data, (3) making memos, (4) coding data, (5) analysing data and (6) displaying data (Woolf & Silver 2018).

To perform the modelling consists of: (1) drawing a path diagram according to the research model framework; (2) testing the outer model to assess the validity and reliability of indicators in measuring the variables (constructs); (3) assessing the goodness-of-fit model to ensure that the processed data fits the estimated model so that the sample used can provide an overview of the actual population conditions; and (4) testing the inner model, which is the stage of testing the influence between variables as a tool to test research hypotheses (Ringle 2015).

Findings and discussion

This study's findings identify young Muslims' views towards tolerance, which are taken from the religious perspective of the Indonesian people, who prioritise moderate attitudes. The researcher identifies the community's views, especially those of young Indonesians, towards tolerance. In the end, this view is taken as the principle and value of the Indonesian people in their attitude, especially towards the value of plurality.

Youth national commitment

National commitment is an attachment to full responsibility to be loyal and grow self-awareness as an Indonesian nation. Without a consistent national commitment from citizens, the state cannot stand upright and achieve the aspirations and hopes of its people. National commitment is related to the attitude of young people towards the symbols of the state and the basic consensus, that is, the agreement of the entire Indonesian nation. Youth's national commitment can be seen in Figure 1.

In Figure 1, the aspect of national commitment from students from the western, central, and eastern parts of Indonesia is relatively the same, but the differences are not too significant. However, there are some aspects to this finding. All young people do not agree with the caliphate (*khilafah*) state because it contradicts the state ideology,

namely Pancasila. *Khilafah* is one of the most massive and crucial issues in Indonesia. One of the mass organisations carrying the caliphate issue is Hizb ut-Tahrir, which claims that they are here to fight what they claim is a secular-capitalist-nationalist system and considers Muslims who believe in democracy to be *kufir*, infidels or even apostates, and those who have embraced democracy deviate from the faith (Valentine, 2010). The government dissolved HTI (*Hisbut Tahrir Indonesia*, an Indonesian Islamic organisation based on Government Regulation in Law Number (*Perppu*) 2 of 2017, namely Law Number 17 of 2013 concerning civil society organisations (CSO). Through this *Perppu*, the government has the authority to prohibit organisations that 'spread ideological or philosophical doctrines that violate Pancasila and the 1945 Constitution'. Previous findings corroborate that as many as 81.5% of millennial youth support and commit to the Unitary State of the Republic of Indonesia (IDN Research Institute 2019). Meanwhile, all youth informants (100%) also considered Pancasila to follow Islamic teachings, and all informants recognised Pancasila as the state ideology.

Youth antiviolence attitude

Antiviolence is one of the pillars of religious moderation that young people must possess. Even now, nonviolent education is developing, which can also be called peaceful education, and is conducted wholeheartedly to educate, not teach. In Figure 2, young people's attitudes towards nonviolence are shown.

In Figure 2, young people from western, central and eastern Indonesia generally show an antiviolence attitude. They will not mediate conflict (4%) if it is on a scale that the local government can handle. If the conflict is widespread, 20% of youth informants from eastern Indonesia will become mediators in the event of a conflict. Two percent of informants are willing to commit acts of violence. They will do so if the religion they believe in is disturbed from the outside. All the informants indicated that they would not do any damage even

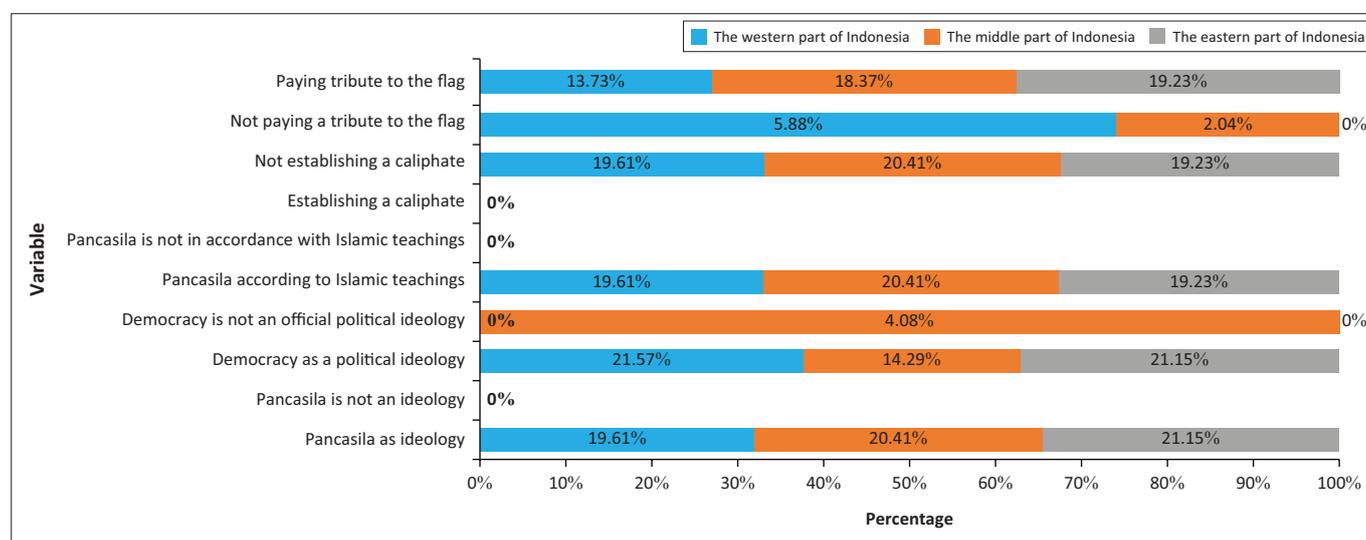


FIGURE 1: Youth national commitment.

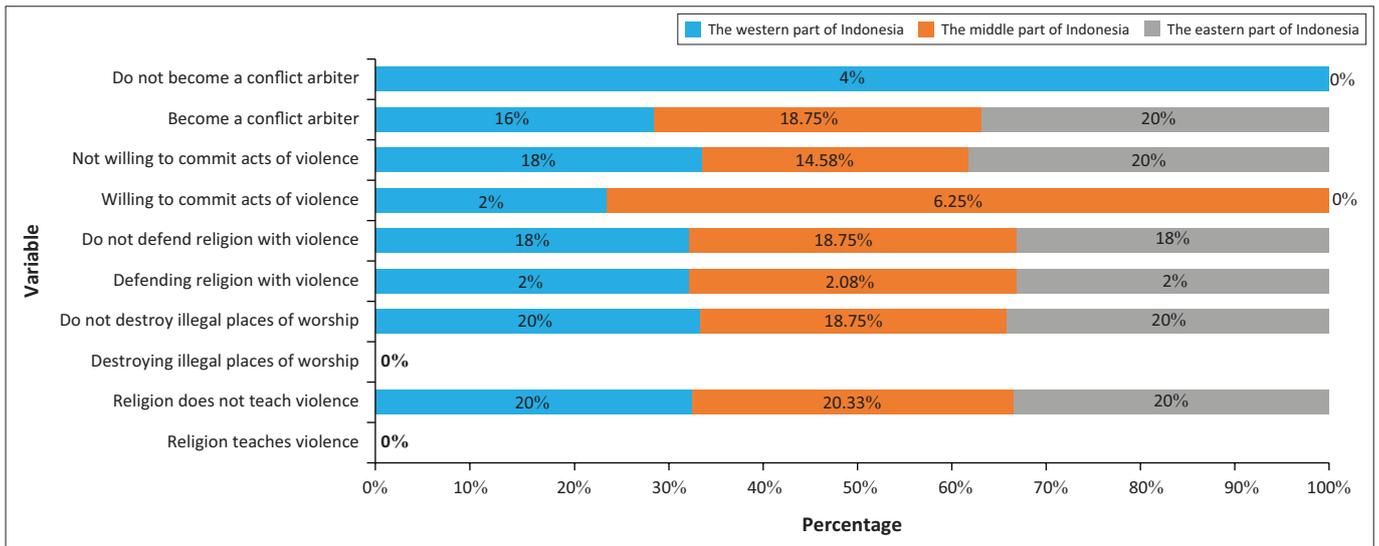


FIGURE 2: Youth attitude towards anti-violence.

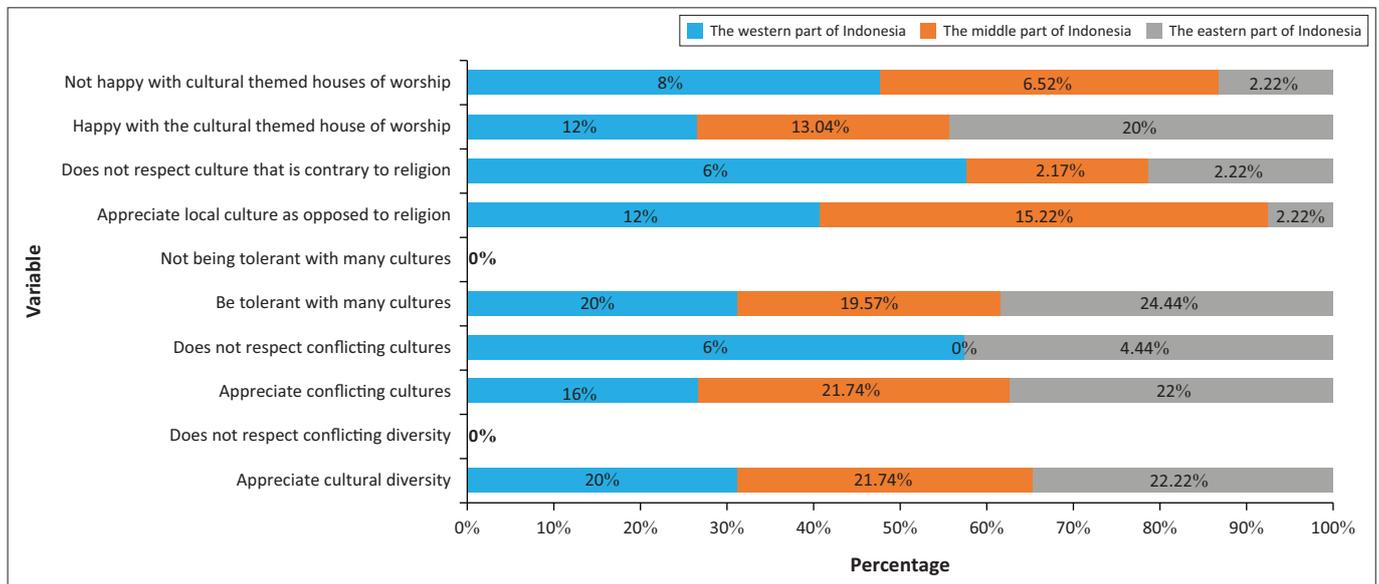


FIGURE 3: Youth attitude of accommodation towards local culture.

though there are illegal places of worship and would leave it to the government to deal with the authority about its legal issue. While attitudes towards violent behaviour are often associated with religion, they disagree. Religion does not teach violence against followers of other religions or houses of worship.

The data explain that young Indonesians have shown a positive attitude towards fighting violence in the name of religion. Violence deviates from behavioural norms, passion, intensity or attitude polarity (Kruglanski & Orehek 2012). In this case, violent extremism can be explained as firmness of belief, willingness to defend a position, firmness of opinion and using violent means. They tend to refuse and position themselves as mediators in every conflict.

Youth attitudes towards local culture

Local cultural diversity is a social phenomenon that can shape each region's cultural character and image. Every

society has a local culture inherent in the community, including young people. Local culture arises when residents of an area already have the same mindset and social life, so it becomes a habit that distinguishes them from other residents.

In Figure 3, young people's answers to the culture generally show the same character. There are indicators of a strengthened attitude of respect for local culture, which is the fundamental value of their lives. Young people from eastern Indonesia showed a more positive attitude towards houses of worship with cultural themes (20%). Furthermore, regarding tolerance of various cultures that grow in their environment, young people from eastern Indonesia also show a higher attitude, as much as 24.44%. This is because, in eastern Indonesia, various local cultures are still relatively well preserved and live in a pluralistic socioreligious situation. Likewise, concerning culture, young people from eastern Indonesia appreciate the various culture in their surroundings with 22.22%.

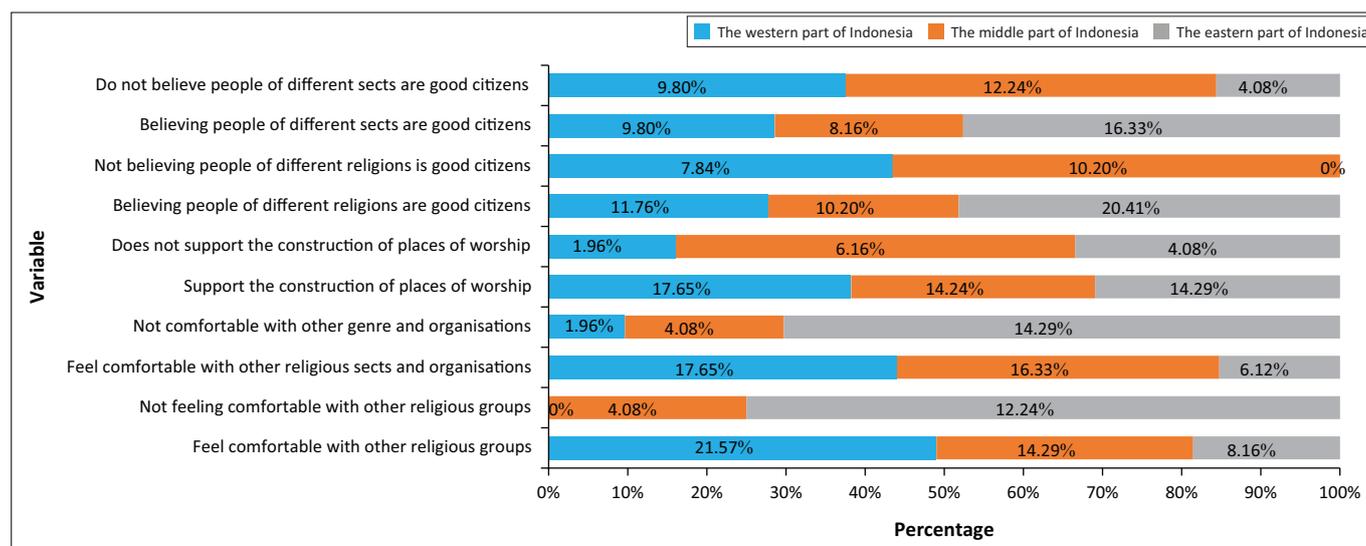


FIGURE 4: Youth tolerance.

Local culture, in several studies, can be used as a glue for differences between religions and become unique in Indonesia (Pajarianto et al. 2022). Moderate people tend to be more accepting of local traditions and culture in their religious behaviour, as long as they do not conflict with the central teachings of religion. Indonesian society is rich in local culture that adapts and manages resources for mutual prosperity (Pesurnay 2018), often associated with myths even though it grows dynamically following human innovation and creativity (Effendi 2019). It is essential to revitalise local culture by strengthening tolerance for various Indonesian treasures.

Youth tolerance

In Figure 4, the findings of the informants' answers on the tolerance attitude of young people show that there are different perceptions and responses about tolerance. Western Indonesian informants show that; they believe that people from different streams or mazhabs can be good citizens (9.80%) while unsure of values (9.80%). Do not believe that people of other religions are good citizens (7.84%); believe that people of different religions are good citizens (11.76%). It does not support the construction of places of worship (1.96%) but supports the construction of places of worship (17.65%). They were not feeling comfortable with other streams and organisations (1.96%), feeling comfortable with other streams and organisations (17.65%). Do not feel comfortable with other groups (0%) and feel comfortable with other religious groups (21.57%).

The middle part of the Indonesian informant shows that; they do not believe that people from different streams or mazhabs can be good citizens (12.24%) and believe in values (18.16%). Do not believe that people of other religions are good citizens (10.20%); believe that people of different religions are good citizens (10.20%). It does not support the construction of places of worship (6.12%) but supports the construction of places of worship (14.24%). Don't feel comfortable with other streams and organisations (4.08%),

feel comfortable with other streams and organisations (16.33%). Do not feel comfortable with other groups (4%) and feel comfortable with other religious groups (14.29%).

Eastern Indonesian informants show that; they do not believe that people from different streams or mazhabs can be good citizens (4.08%) and believe in values (16.33%). Do not believe that people of other religions are good citizens (0%); believe that people of different religions are good citizens (20.41%). It does not support the construction of places of worship (4.08%) but supports the construction of places of worship (14.29%). They were not feeling comfortable with other streams and organisations (14.29%), feeling comfortable with other streams and organisations (16.33%). Do not feel comfortable with other groups (12.24%) and feel comfortable with other religious groups (8.16%).

The attitude of not believing that people of different religions do not make good citizens because there are schools of thought or certain groups that are not in line with the Indonesian government system. Hence, the views of these groups are limited and only look at it from one religious lens even though the world's religions have the resources to respect religious freedom (Kärkkäinen, 2017) and have universal views whose values can be accepted by all adherents of religions.

Attitude of young people's intellectual humility

Intellectual humility (intellectually) is often considered one factor in how someone learns something new, because humility involves acknowledging one's limitations, including ignorance of something. Young people must have this attitude, as social skills are needed in the field of work or to stem the flow of radicalism that can arise from an attitude of self-righteousness and claiming that others are wrong. Thus, this attitude is very relevant as a mainstream viewpoint among young people.

In Figure 5, Muslim youth informants have several variants of attitudes towards different views. Western Indonesian informants are motivated to learn if they do not understand

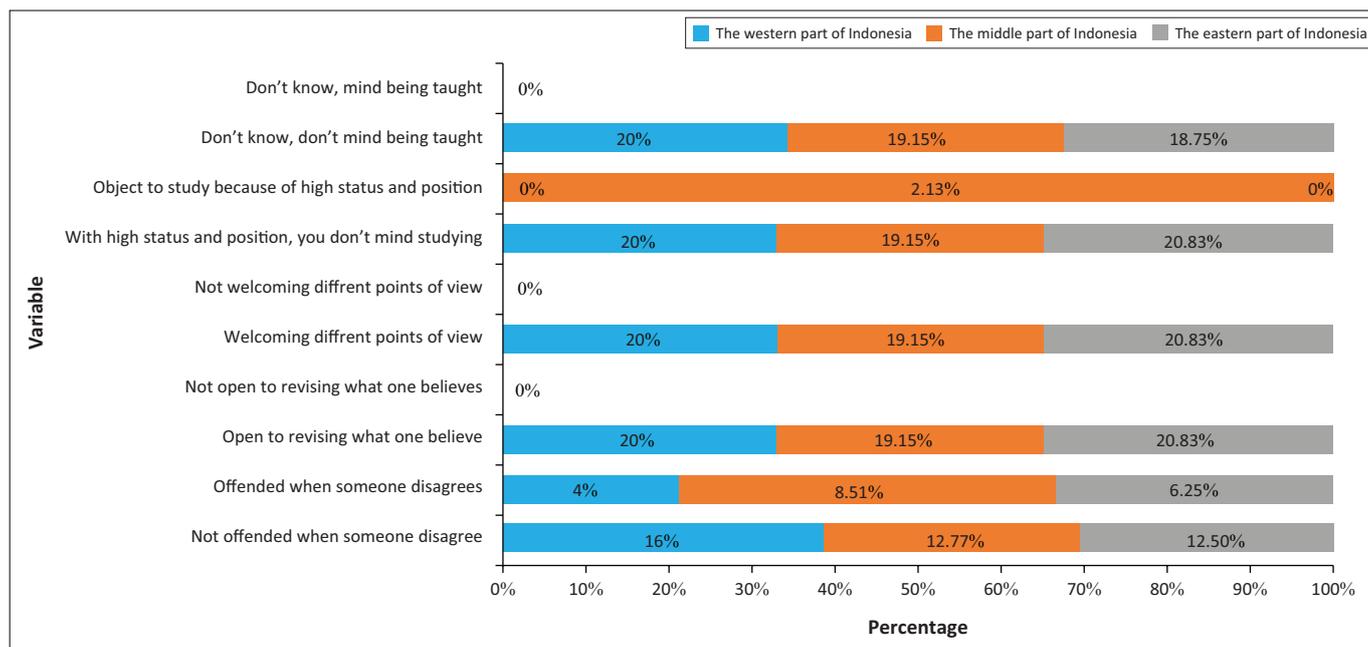


FIGURE 5: The attitude of intellectual humility.

(20%), do not mind being taught (20%), welcome new views (20%) and are open to revising their views (20%); some are offended when someone disagrees (4%), and others are not offended by people who disagree (16%). In this aspect, all informants do not mind being given information, taught and learning from others, as well as welcoming new views even though they are different. It can also be seen in the readiness of all informants to revise their views if they are wrong, which indicates that young people's intellectual humility is high and stable. These views are not much different from those of the informants in the central and eastern parts.

These results are relevant to several findings on humility and religiosity regarding religious tolerance (Hook et al. 2017; Krumrei-Mancuso 2018; Leary et al. 2017; Rodriguez et al. 2017; Zhang et al. 2018). From these results, it can be concluded that there is a successful application of the concept of religious moderation (Muhtifah et al. 2021). Thus, intellectual humility is easier to form and strengthens tolerance (Church & Samuelson 2016; Leary et al. 2017). It is what can be offered because, from the research results, the potential for young people to be exposed to radicalism is also quite high (Nafi'a et al. 2022). Nowadays, intellectual humility in religion is difficult to find, so what happens is that one feels self-righteous, which makes it easy to disbelieve in others and makes it challenging to dialogue with other religions. In the end, it is social learning.

Developing a model of religious moderation for young people

The preparation of the model takes into account the stages in the PLS-SEM (Partial Least squares-Structural Equation) analysis (Ringle, 2015) as follows; the first step is with CFA analysis (Confirmatory Factor Analysis) with the Smart PLS program, consisting of several stages: Convergent Validity, Discriminant Validity, and Composite Reliability.

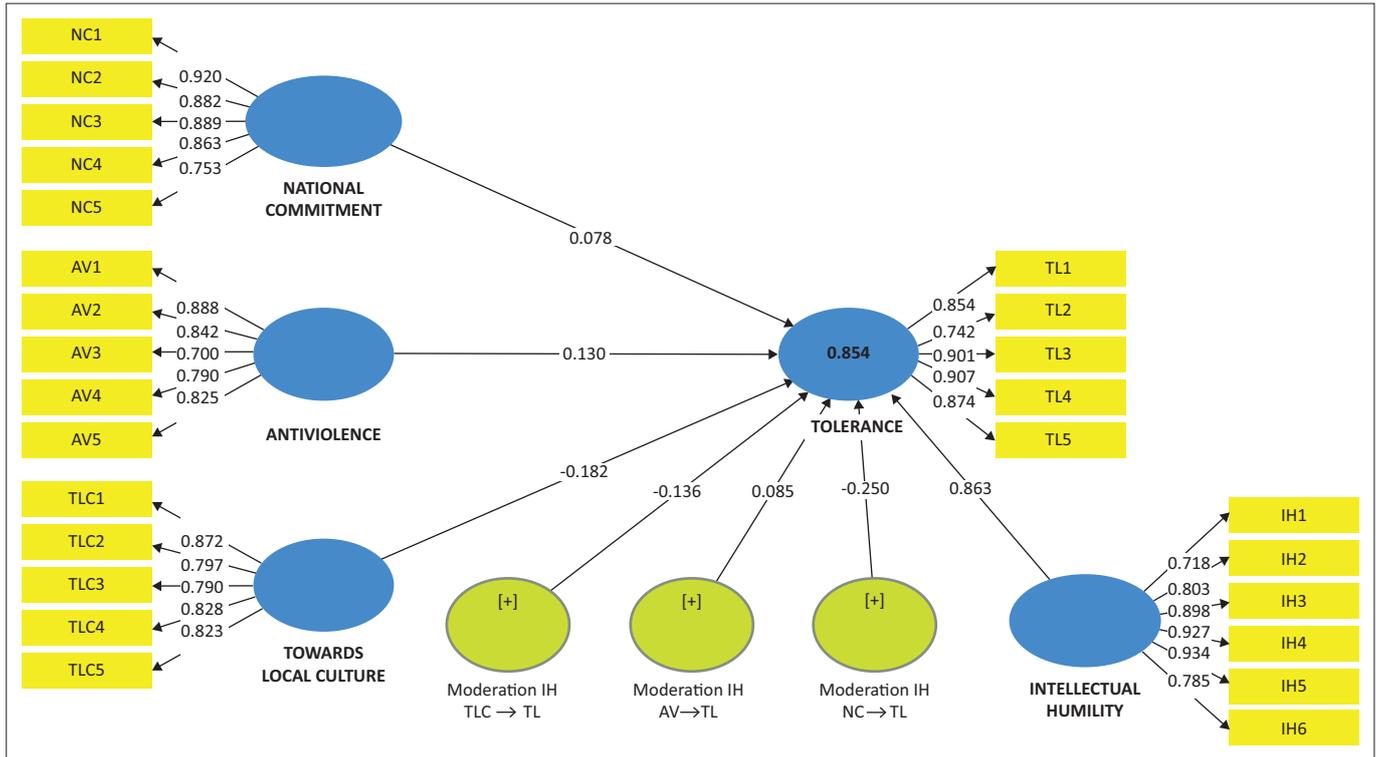
The results of the PLS analysis can be used to test the research hypothesis if all indicators in the PLS model have met the requirements of convergent validity, discriminant validity, and composite reliability. The estimation results of the PLS model with algorithmic techniques can be seen in the following figure.

In the second step, the researcher conducted a convergent validity test by looking at the loading factor value of each indicator on the construct. Because this is confirmatory, the limit for the loading factor used is 0.7. The loading factor value can be seen in Table 1.

Based on the analysis in Table 1, the results show that all indicators have a loading factor value > 0.7 , which means that all indicators can be used to measure the construct; no indicators must be excluded because all indicators have met the validity criteria required. In addition to looking at the loading factor value of each indicator, convergent validity must also be assessed from the average variance extracted (AVE) value of each construct; all constructs in the PLS model are declared to have met convergent validity if the AVE value of each construct is > 0.5 . The complete AVE value of each construct can be seen in Table 2.

Based on the results of the PLS analysis in Table 2, after invalid indicators were removed from the model, all indicators were valid in measuring the construct. Then, assessed from the AVE value, all constructs also had an AVE value exceeding 0.5, which means that all construct indicators have met the required convergent validity criteria. The analysis stage is continued at the discriminant validity test stage.

The third step, discriminant validity, is carried out to ensure that each concept of each latent variable is different from the



AV, antiviolence; IH, intellectual humility; NC, national commitment; TLC, towards local culture; TL, tolerance.

FIGURE 6: Estimation results of the partial least squares algorithm model.

TABLE 1: Loading factor value on convergent validity test.

Variable	Indicator	Loading factor	Cut value	Convergent validity
National commitment	NC-1	0.920	0.7	Valid
	NC-2	0.882	0.7	Valid
	NC-3	0.869	0.7	Valid
	NC-4	0.863	0.7	Valid
	NC-5	0.753	0.7	Valid
Accommodation towards local culture	TLC-1	0.872	0.7	Valid
	TLC-2	0.797	0.7	Valid
	TLC-3	0.790	0.7	Valid
	TLC-4	0.828	0.7	Valid
	TLC-5	0.823	0.7	Valid
Antiviolence	AV-1	0.888	0.7	Valid
	AV-2	0.842	0.7	Valid
	AV-3	0.700	0.7	Valid
	AV-4	0.790	0.7	Valid
	AV-5	0.825	0.7	Valid
Intellectual humility	IH-1	0.718	0.7	Valid
	IH-2	0.803	0.7	Valid
	IH-3	0.898	0.7	Valid
	IH-4	0.927	0.7	Valid
	IH-5	0.934	0.7	Valid
	IH-6	0.785	0.7	Valid
Tolerance	TL-1	0.854	0.7	Valid
	TL-2	0.742	0.7	Valid
	TL-3	0.901	0.7	Valid
	TL-4	0.907	0.7	Valid
	TL-5	0.874	0.7	Valid

AV, antiviolence; IH, intellectual humility; NC, national commitment; TLC, towards local culture; TL, tolerance.

other variables. The model has good discriminant validity if the AVE square value of each exogenous construct exceeds the correlation between the construct and other constructs. The results of the discriminant validity test are obtained as follows:

TABLE 2: Construct average variance extracted (AVE) value.

Construct	AVE
TLC	0.676
AV	0.659
IH	0.719
NC	0.739
MOD_TLC	1.000
MOD_AV	1.000
MOD_NC	1.000
TL	0.736

TLC, accommodation toward local culture; AV, anti violence; IH, intellectual humility; NC, national commitment; MOD_TLC, moderation accommodation toward local culture; MOD_AV, moderation_anti violence; MOD_NC, moderation_national commitment; TL, tolerance.

Based on the results of the discriminant validity test in the Table 3, it was found that the square root value of the AVE of all constructs consistently exceeded the correlation coefficient of the construct with other constructs. So it can be concluded that all constructs in this PLS model have met the required discriminant validity.

In addition to using the Fornell–Larcker method, discriminant validity can be seen from the cross-loading value of each indicator to the construct. The indicator is declared to meet the discriminant validity criteria if the cross-loading indicator to the construct is higher than the cross-loading indicator value to other constructs.

The results of the two discriminant validity tests showed that the outer PLS model has met the required discriminant validity criteria. Based on the results of the discriminant validity test in Table 4, it can be seen that all indicators had

TABLE 3: Discriminant validity according to the Fornell–Larcker test.

Construct	TLC	AV	IH	NC	MOD_TLC	MOD_AV	MOD_NC	\sqrt{AVE}
TLC	0.822	-	-	-	-	-	-	0.822
AV	0.882	0.812	-	-	-	-	-	0.812
IH	0.931	0.904	0.848	-	-	-	-	0.848
NC	0.879	0.888	0.882	0.859	-	-	-	0.859
MOD_TLC	-0.794	-0.812	-0.735	-0.781	1.000	-	-	1.000
MOD_AV	-0.801	-0.814	-0.725	-0.798	0.984	1.000	-	1.000
MOD_NC	-0.786	-0.813	-0.725	-0.781	0.986	0.989	1.000	1.000
TL	0.842	0.862	0.915	0.834	-0.706	-0.701	-0.709	0.858

TLC, accommodation toward local culture; AV, anti violence; IH, intellectual humility; NC, national commitment; MOD_TLC, moderation accommodation toward local culture; MOD_AV, moderation_anti violence; MOD_NC, moderation_national commitment; TL, tolerance.

TABLE 4: Discriminant validity according to cross loading value.

Indicator	TLC	AV	IH	NC	TL
TLC1	0.872	0.871	0.852	0.803	0.719
TLC2	0.797	0.650	0.652	0.607	0.584
TLC3	0.790	0.650	0.712	0.647	0.663
TLC4	0.828	0.718	0.781	0.847	0.694
TLC5	0.823	0.722	0.808	0.693	0.777
AV1	0.794	0.888	0.777	0.831	0.722
AV2	0.698	0.842	0.703	0.716	0.674
AV3	0.524	0.700	0.539	0.605	0.538
AV4	0.616	0.790	0.702	0.620	0.682
AV5	0.881	0.825	0.887	0.798	0.834
IH1	0.616	0.702	0.718	0.646	0.725
IH2	0.678	0.622	0.803	0.674	0.684
IH3	0.861	0.802	0.898	0.764	0.871
IH4	0.911	0.897	0.927	0.878	0.808
IH5	0.917	0.878	0.934	0.859	0.826
IH6	0.714	0.663	0.785	0.641	0.719
NC1	0.898	0.887	0.900	0.920	0.812
NC2	0.719	0.743	0.723	0.882	0.700
NC3	0.760	0.788	0.748	0.869	0.790
NC4	0.769	0.739	0.756	0.863	0.709
NC5	0.590	0.624	0.637	0.753	0.523
TL1	0.725	0.773	0.784	0.717	0.854
TL2	0.588	0.718	0.652	0.666	0.742
TL3	0.717	0.715	0.805	0.710	0.901
TL4	0.778	0.779	0.821	0.813	0.907
TL5	0.785	0.718	0.849	0.668	0.874

TLC, accommodation toward local culture; AV, anti violence; IH, intellectual humility; NC, national commitment; TL, tolerance.

the highest indicators in their constructs, not in other constructs, so it can be stated that all indicators have met the requirements of discriminant validity. For example, the TL5 indicator had a cross-loading of 0.874 to the construct (TL), while for the other constructs, the cross-loading of TL5 was lower than 0.874, which was 0.785 for the ABL construct, 0.718 for the AK, 0.849 for the IH and 0.668 for the KK, so that it can be stated that the discriminant validity of the TL5 was fulfilled.

The fourth step was to carry out construct reliability, which can be assessed from Cronbach's alpha value and the composite reliability value of each construct. The recommended value of composite reliability and Cronbach's alpha is more than 0.7. However, in development research, because the limit of the loading factor used is low (0.5), the value of composite reliability and low Cronbach's alpha are still acceptable as long as the requirements for

TABLE 5: Composite reliability.

Construct	Cronbach's alpha	Composite reliability
TLC	0.880	0.913
AV	0.869	0.906
IH	0.920	0.938
NC	0.911	0.934
MOD_TLC	1.000	1.000
MOD_AV	1.000	1.000
MOD_NC	1.000	1.000
TL	0.909	0.933

TLC, Accommodation Toward Local Culture; AV, Anti Violence; IH, Intellectual Humility; NC, National Commitment; MOD_TLC, Moderation Accommodation Toward Local Culture; MOD_AV, Moderation_Anti Violence; MOD_NC, Moderation_National Commitment; TL, Tolerance.

convergent validity and validity are met. Discriminant validity has been met.

Based on the analysis results in Table 5, the composite reliability value of all constructs also exceeded 0.7. This indicates that all constructs have met the required reliability, so it can be concluded that all constructs were reliable, while based on Cronbach's alpha value, the performance was still below 0.7. It can be ignored. The performance construct can still be considered reliable because the reliability measurement using the composite reliability value is considered better than the reliability measurement using Cronbach's alpha. With steps taken systematically, the preparation of the model has met the requirements so that it can be continued with model testing.

Relying on this research model, preparing religious moderation education for young people is essential by combining various approaches, including strengthening intellectual humility, which will impact tolerance. The alternative is an integrative religious moderation intervention, namely by combining psychological and counter-ideological support programmes, increasing critical, open and reflective thinking skills (Milla, Putra & Umam 2019; Milla & Umam 2019), open-mindedness as one of the intellectual humility abilities (Kruglanski et al. 2018), psychological support through identity strengthening and counselling (Bouzar & Martin 2016) and an emphasis on cognitive complexity. In other research, young Indonesians agree with tolerance as much as 93%; they view intolerance as a terrible value (Pandey 2020). In future research, these aspects will be considered to test the model of religious moderation in youth.

Conclusion

This study concludes that intellectual humility is needed to mediate religious moderation, which consists of national commitment, antiviolence and accommodation of local culture towards youth tolerance. The data coding shows that intellectual humility attitudes mediate antiviolence attitudes towards groups and communities. Antiviolence attitudes towards groups encourage accommodative attitudes towards the local culture and impact tolerance in the aspect of national commitment that strengthens tolerance with mediation from intellectual humility. With this finding, the religious moderation programme must consider the integration of all disciplines in developing a model of religious moderation that is relevant to the needs of dynamic youth. The preparation of the model of religious moderation in this research has fulfilled all the requirements, so it can be continued for testing.

Theoretically and practically, this research contributes to the development of a model of religious moderation which is currently only dominated by faith and belief in the teachings of the scriptures. The religious attitudes of young people must be moderated with various instruments that suit their unique and distinctive needs amidst the rapid development of digitalization.

Acknowledgements

Thank you to the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia for funding this research. The same goes for all the young people who became informants in this study.

Competing interests

The authors declare that they have no financial or personal relationships that may have inappropriately influenced them in writing this article.

Authors' contributions

H.P., I.P. and N.S.G. were all involved in the preparation, research design, data collection, analysis and article writing.

Ethical considerations

This article followed all ethical standards for research.

Funding information

This research was funded by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of Indonesia.

Data availability

The data that support the findings of this study are available within the article.

Disclaimer

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated agency of the authors.

References

- Ali, N., 2020, 'Measuring religious moderation among Muslim students at public colleges in Kalimantan facing disruption era', *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.1-24>
- Arikunto, S., 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bouzar, D. & Martin, M., 2016, 'Méthode expérimentale de déradicalisation: quelles stratégies émotionnelles et cognitives?', *Pouvoirs* 3, 83–96. <https://doi.org/10.3917/pouv.158.0083>
- Brandão, C., 2015, 'Qualitative data analysis with NVivo', *Qualitative Research* 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Church, I. & Samuelson, P., 2016, *Intellectual humility: An introduction to the philosophy and science*, Bloomsbury Publishing, London.
- Dawing, D., 2017, 'Mengungkap Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13(2), 225–255. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- Dodego, S.H.A. & Witro, D., 2020, 'The Islamic moderation and the prevention of radicalism and religious extremism in Indonesia', *Dialog* 43(2), 199–208. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375>
- Edwards-Jones, A., 2014, 'Qualitative data analysis with NVIVO', *Journal of Education for Teaching* 40(2), 193–195. <https://doi.org/10.1080/02607476.2013.866724>
- Effendi, T.D., 2019, 'Local wisdom in tolerance building between ethnic Chinese and other ethnics in Indonesia', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 276, 203–206. <https://doi.org/10.2991/iconarc-18.2019.104>
- Fahri, M. & Zainuri, A., 2019, 'Moderasi Beragama di Indonesia', *Intizar* 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Foot, D.K. & Stoffman, D., 1996, *Boom, bust & echo: How to profit from the coming demographic shift*, Macfarlane Walter & Ross Toronto.
- Frydenlund, I., 2015, *The rise of Buddhist-Muslim conflict in Asia and possibilities for transformation*, Norwegian Peacebuilding Research Centre (NOREF).
- Gilleard, C., 2004, 'Cohorts and generations in the study of social change', *Social Theory & Health* 2(1), 106–119.
- Göransson, K.E., Ehrenberg, A., Ehnfors, M. & Fonteyn, M., 2007, 'An effort to use qualitative data analysis software for analysing think aloud data', *International Journal of Medical Informatics* 76, 270–273. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.05.004>
- Hasudungan, A.N., 2021, 'Muslim and Christian relations in the field of education after The Ambon-Maluku conflict (The Biggest Religious Conflict in Indonesia)', *Journal of Education, Society & Multiculturalism* 1(3), 40–54.
- Hook, J.N., Farrell, J.E., Johnson, K.A., Van Tongeren, D.R., Davis, D.E. & Aten, J.D., 2017, 'Intellectual humility and religious tolerance', *The Journal of Positive Psychology* 12(1), 29–35. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1167937>
- Humble, A. & Radina, M.E., 2019, *How qualitative data analysis happens*, Routledge, New York.
- IDN Research Institute, 2019, *Indonesia millennial report 2019*, pp. 1–10.
- Jackson, K. & Bazeley, P., 2019, *Qualitative data analysis with NVivo*, Sage, New York.
- Kalhor, J.A. & Cromwell, A., 2022, 'Musharraf's Enlightened Moderation: How Education Escalates Conflict in Pakistan Despite Attempted Transformation', in *Teaching Peace and Conflict*, pp. 43–61, Springer.
- Kärkkäinen, V.-M., 2017, 'Miroslav Volf, Flourishing: Why we need religion in a globalized world (New Haven: Yale University Press, 2015), pp. xviii+ 280.£ 18.99/\$28.00', *Scottish Journal of Theology* 70(4), 477–479. <https://doi.org/10.1017/S0036930616000648>
- Khairil, M., 2017, 'The transformation of the symbolic meaning of radicalism in acts of terrorism post-conflict in PosoCentral Sulawesi', in *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, 23–25 Nopember2017, pp. 282–289, Riau.
- Kruglanski, A., Jasko, K., Webber, D., Chernikova, M. & Molinaro, E., 2018, 'The making of violent extremists', *Review of General Psychology* 22(1), 107–120. <https://doi.org/10.1037/gpr0000144>
- Kruglanski, A.W. & Orehek, E., 2012, 'Need for certainty as a psychological nexus for individuals and society', in E. Orehek (ed.), *Extremism and the psychology of uncertainty*, pp. 3–18, Blackwell Publishing, United Kingdom.
- Krumrei-Mancuso, E.J., 2018, 'Intellectual humility's links to religion and spirituality and the role of authoritarianism', *Personality and Individual Differences* 130, 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.037>
- Krumrei-Mancuso, E.J. & Rouse, S.V., 2016, 'The development and validation of the comprehensive intellectual humility scale', *Journal of Personality Assessment* 98(2), 209–221. <https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1068174>
- Leary, M.R., Diebels, K.J., Davison, E.K., Jongman-Sereno, K.P., Isherwood, J.C., Raimi, K.T. et al., 2017, 'Cognitive and interpersonal features of intellectual humility', *Personality and Social Psychology Bulletin* 43(6), 793–813. <https://doi.org/10.1177/0146167217697695>

- Mannheim, K., 1984, *Sociology of knowledge*, Tavistock Publication Limited, United Kingdom.
- Markus, A., 2017, *Multiculturalism discussion paper young adults and cultural diversity: Experiences and challenges discussion paper*, Scanlon Foundation, Monash University, Australia.
- Milla, M.N., Putra, I.E. & Umam, A.N., 2019, 'Stories from jihadists: Significance, identity, and radicalization through the call for jihad', *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 25(2), 111. <https://doi.org/10.1037/pac0000371>
- Milla, M.N., 2019, 'Enacting Intergroup Contact on Terrorism Prisoners in Indonesia', in M. Khader, N. Lo Seng & J. Tan (eds.), *Learning From Violent Extremist Attacks Behavioural Sciences Insights for Practitioners and Policymakers*, World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, India.
- Moleong, L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung.
- Muhtifah, L., Prasajo, Z.H., Sappe, S. & Elmansyah, E., 2021, 'The theology of Islamic moderation education in Singkawang, Indonesia: The city of tolerance', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77(4), 10. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6552>
- Nafi'a, I., Gumindari, S., Hakim, M.A., Safii, S. & Rokhmadi, R., 2022, 'Mitigating radicalism amongst Islamic college students in Indonesia through religious nationalism', *HTS Theological Studies* 78(4), 1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7547>
- Pajarianto, H., 2022, 'Interreligious relation: Position of women in strengthening Christian and Muslim bonds', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78(4), 7. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7096>
- Pajarianto, H., Pribadi, I. & Sari, P., 2022, 'Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78(4), 8. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Pandey, S., 2020, 'Executive Summary Survei Persepsi dan Sikap Generasi Muda Terhadap Intoleransi dan Ekstremisme 2020', *South African Medical Journal* 101(2003), 16.
- Pesurnay, A.J., 2018, 'Local wisdom in a new paradigm: Applying system theory to the study of local culture in Indonesia', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175(1), 12037. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012037>
- Purwati, P., Darisman, D. & Faiz, A., 2022, 'Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan', *Jurnal Basicedu* 6(3), 3729–3735. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2733>
- Ringle, C.M., Wende, S. & Becker, J.-M., 2015, *SmartPLS 3*, SmartPLS GmbH, Boenningstedt. <http://www.smartpls.com>.
- Rodriguez, D., Perez, C., Jagersand, M. & Figueroa, P., 2017, 'A comparison of smartphone interfaces for teleoperation of robot arms', in 2017 *XLIII Latin American Computer Conference (CLEI)*, pp. 1–8.
- Rogers, B., 2018, 'Rejecting religious intolerance in South-East Asia', *JSEHR* 2, 208.
- Rusyaid, R., Hermanto, H. & Nasir, S.H., 2022, 'Satu Tungku Tiga Batu: The Model of Religious Moderation in Fak-Fak Regency, West Papua', in 9th *Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* pp. 675–679, Atlantis Press.
- Singh, A., 2018, 'Conflict between freedom of expression and religion in India – A case study', *Social Sciences* 7(7), 108. <https://doi.org/10.3390/socsci7070108>
- Spradley, J.P., 2016, *Participant observation*, Waveland Press, United States of America.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R. & Sa'diyah, S., 2022, 'Religious moderation in Indonesian Muslims', *Religions* 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sugiyono, 2017, *Combination research methods (mixed methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Syarif, F., 2019, 'Religion in the conflict flows', *ADDIN* 13(2), 337–368. <https://doi.org/10.21043/addin.v13i2.6452>
- Thiagarajan, S., Semmel, D.S. & Semmel, M.I., 1974, *Instructional development for training teachers of exceptional children*, Leadership Training Institute/Special Education, Minneapolis, MN.
- Valentine, S.R., 2010, 'Monitoring Islamic militancy: Hizb-ut-Tahrir: "The Party of Liberation"', *Policing: A Journal of Policy and Practice* 4(4), 411–420. <https://doi.org/10.1093/police/paq015>
- Wolhuter, C.C., Potgieter, F.J. & Van der Walt, J.L., 2014, 'Modelle van interreligieuse toleransie in die onderwys van die een-en-twintigste eeu', in *Die Skriflig/In Luce Verbi* 48(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1798>
- Woolf, N.H. & Silver, C., 2018, *Qualitative analysis using Nvivo, The five level QDA method*, pp. 1–1235, Routledge.
- Yazdani, A., 2020, 'The culture of peace and religious tolerance from an Islamic perspective', *Veritas* 47, 151–168. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732020000300151>
- Zakaria, F., 2020, 'Review of Nur Amali Ibrahim, improvisational Islam: Indonesian youth in a time of possibility', *Contemporary Islam* 14(1), 95–98. <https://doi.org/10.1007/s11562-019-00440-z>
- Zhang, H., Hook, J.N., Farrell, J.E., Mosher, D.K., Van Tongeren, D.R. & Davis, D.E., 2018, 'The effect of religious diversity on religious belonging and meaning: The role of intellectual humility', *Psychology of Religion and Spirituality* 10(1), 72. <https://doi.org/10.1037/rel0000108>
- Zulkifli, D., Suyasa, I.N., Maulita, M., Suharti, R., Rachmad, B., Dewi, I.J.P. et al., 2019, 'A conflict analysis of management of fishery resources in Kalimantan, Indonesia', *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies* 7(4), 78–85.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan
Telpon (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241
Website: www.lldikti9.kemdikbud.go.id

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**

Nomor : 249/LL9/PK.00.PG/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Andi Lukman** : **Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Salju** : Sebagai **Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo** yang berkedudukan di **Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Binturu Wara Selatan Palopo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2022, selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

PASAL I
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022 sebanyak **1 (Satu)** judul penelitian
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar nama pelaksana penelitian, skema luran tambahan, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak penelitian ini

PASAL 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Revisi 02 Tanggal 22 April 2022.

PASAL 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian dengan nilai kontrak sebesar **Rp.126.400.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu)** yang nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palopo
Nomor Rekening	: 040301001535561
Nama pada rekening	: Universitas Muhammadiyah Palopo
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: JL Perintis Kemerdekaan
Kota	: Palopo
NPWP Perguruan Tinggi	: 80.016.778.5-803.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 88.480.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu)** setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b) pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh DRTPM;
 - c) pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. **37.920.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu)**, dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan;
 - d) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh DRTPM paling lambat 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB); dan
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- (4) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban;
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah menerima dana dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian, dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua Pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitia;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi.
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak penelitian yang dilakukan oleh para pelaksana penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh DRTPM atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitain;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh DRTPM, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh DRTPM sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitain;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 - g. luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU setelah menerima dana dari DRTPM.

PASAL 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran,

- kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

PASAL 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman.
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

PASAL 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp 10.000

ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

PASAL 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp 10.000
ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan
Telpon (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241
Website: www.lldikti9.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 372/LL9/PK.00.PG/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Andi Lukman**
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi
Alamat : Jalan Bung KM. 9 Tamalanrea, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI Wilayah IX Jl. Bung KM. 9 Tamalanrea, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Salju**
Jabatan : Rektor
NPWP : 80.016.778.5-803.000
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Binturu Wara Selatan Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palopo di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Binturu Wara Selatan Palopo yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No Surat Perjanjian : 249/ LL9/PK.00.PG/2022
- Tanggal : 13 Juni 2022
- Nilai Perjanjian : **Rp. 126.400.000,-**
(Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Penugasan Program Penelitian 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut

1. Pembayaran tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan Pembayaran

- a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 88.480.000,-**
- b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
- c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 88.480.000,-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank BRI **Rekening No. 040301001535561** atas nama **Universitas Muhammadiyah Palopo**.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd+ stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salju**
NIDN : **0902046801**
Jabatan : **Rektor**
Institusi : **Universitas Muhammadiyah Palopo**
No. Surat : **249/LL9/PK.00.PG/2022**
Jumlah Judul : **1 Judul**
Jumlah Dana : **Rp. 126.400.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan program penelitian ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan program penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan program penelitian

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah
Palopo,

Materai 10.000
Cap+tttd

Salju
NIDN. 0902046801

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salju**
NIDN : **0902046801**
Jabatan : **Rektor**
Institusi : **Universitas Muhammadiyah Palopo**
No. Surat : **249/LL9/PK.00.PG/2022**
Jumlah Judul : **1 Judul**
Jumlah Dana : **Rp. 126.400.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan program penelitian ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan program penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan program penelitian

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

Cap+ttd

Salju
NIDN. 0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == **Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah**==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak
Nomor:249//LL9/PK.00.PG/2022 tan

Rp. 88.480.000

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

Meterai Rp 10.000
ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == ***Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah*** ==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak
Nomor: 249/LL9/PK.00.PG/2022

Rp. 88.480.000

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN.0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == **Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah**==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak
Nomor: 249//LL9/PK.00.PG/2022

Rp.88.480.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar : == **Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu**
(dengan huruf) **rupiah**==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Kedua sesuai Kontrak Nomor:
249//LL9/PK.00.PG/2022

Rp. 37.920.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

Meterai Rp 10.000
ttd + stempel

Andi Lukman.
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar : == **Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu**
(dengan huruf) **rupiah**==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Kedua sesuai Kontrak Nomor
: 249/LL9/PK.00.PG/2022anggal

Rp. 37.920.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == ***Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu rupiah***==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Program Penelitian Tahap Kedua sesuai Kontrak Nomor
: 249/LL9/PK.00.PG/2022

Rp. 37.920.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palopo,

ttd + stempel

Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Salju
NIDN. 0902046801

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr HADI PAJARIANTO S.Pd.I, M.Pd I

Alamat : PERUM BUMI PASSIRING JL. TOCIUNG BLOK B NO.3

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 036/E5/PG.02.00/2022 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 249/LL9/PK.00.PG/2022 mendapatkan Anggaran Penelitian MODEL MODERASI BERAGAMA KAUM MUDA MUSLIM MILENIAL DALAM PENGUATAN SIKAP TOLERANSI MELALUI INTELLECTUAL HUMILITY Sebesar 126,400,000

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	Bahan Pembelian Kertas, pulpen, note book, map, dll	2,815,334
02	Pengumpulan Data Persiapan, FGD di Indonesia bagian Barat, bagian tengah, bagian Timur	61,107,000
03	Analisis Data(Termasuk Sewa Peralatan Analisis data, honor tim sekretariat, narsum, penginapan, Rental Mobil dan BBM untuk FGD	30,388,666
04	Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan HR tim sekretariat, konsumsi, publikasi, dan luaran tambahan	29,410,000
05	Lain-lain Pajak	2,679,000
	Jumlah	126,400,000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palopo, 27-11-2022

Ketua,



(Dr HADI PAJARIANTO S.Pd.I, M.Pd I)

NIP/NIK 7373051912790002